



RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

2025-2029

**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pebangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 129);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 126); dan
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 130).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab kesatu, pendahuluan;
 - b. bab kedua, gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. bab ketiga, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
 - d. bab keempat, program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab kelima, penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah:
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - c. inspektorat Daerah;
 - d. dinas pendidikan dan kebudayaan Daerah;
 - e. dinas kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana Daerah;
 - f. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah;
 - g. dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, dan perhubungan Daerah;
 - h. dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa Daerah;
 - i. dinas transmigrasi dan tenaga kerja Daerah;
 - j. dinas pangan Daerah;
 - k. dinas lingkungan hidup dan kehutanan Daerah;
 - l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil Daerah;
 - m. dinas komunikasi, informatika, statistik, dan persandian Daerah;
 - n. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah;
 - o. dinas kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif Daerah;
 - p. dinas perpustakaan dan kearsipan Daerah;
 - q. dinas kelautan dan perikanan Daerah;
 - v. dinas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan Daerah;
 - w. dinas perkebunan Daerah;
 - x. dinas energi dan sumber daya mineral Daerah;
 - y. dinas koperasi dan ukm, perindustrian, dan perdagangan Daerah;
 - z. Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Daerah;
 - aa. badan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi Daerah;
 - bb. badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah;

- cc. badan pendapatan Daerah;
 - dd. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Daerah;
 - ee. badan penanggulangan bencana Daerah;
 - ff. badan penghubung Daerah; dan
 - gg. badan kesatuan bangsa dan politik Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 Oktober 2025
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 7 Oktober 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

HERDIN ISMAIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 33

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	52
2.3.1 Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Sulawesi Barat	52
2.3.2 Indeks SPBE	55
2.3.3 Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).....	58
2.3.4 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)	61
2.3.5 Indeks Pembangunan Statistik (IPS).....	65
2.3.6 Cyber Security Maturity (CSM).....	72
2.3.7 Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	73
2.4 Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah 5 Tahun Terakhir	75
2.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	79
2.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan.....	80
2.7 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	81
2.7.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	81
2.7.2 Isu Strategis	83
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	88
3.1 TUJUAN DAN SASARAN.....	88
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	92

3.4 Perumusan Program Prioritas	96
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	97
4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	97
4.2 TARGET KINERJA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	115
4.3 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	116
BAB V PENUTUP	119
5.1 Pedoman Transisi	119
5.2 Kaidah Pelaksanaan	119
5.3 Pengendalian dan Evaluasi	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	8
Gambar 2.1 Perkembangan Indeks Transformasi Digital Nasional Sulawesi Barat .	53
Gambar 2.2 Skor Pilar Sulawesi Barat Tahun 2022	53
Gambar 2.3 Skor Agregat Berdasarkan 5 Pilar TDN Sulawesi Barat 2022	55
Gambar 2.4 Hasil Penilaian Indeks SPBE.....	57
Gambar 2.5 Hasil Penilaian Indeks SPBE per Dimensi Tahun 2024.....	58
Gambar 2.6 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Sulawesi Barat Tahun 2021- 2024	60
Gambar 2.7 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Per Dimensi Sulawesi Barat Tahun 2021- 2024	60
Gambar 2.8 Capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Sulawesi Barat Tahun 2019-2023	63
Gambar 2.9 Capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Per Dimensi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023	64
Gambar 2. 9 Capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Sulawesi Barat Tahun 2023-2024	71
Gambar 2.10 Capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Per Domain Sulawesi Barat Tahun 2023.....	71
Gambar 2.11 Capaian Cyber Security Maturity (CSM) Sulawesi Barat Tahun 2022-2024	73
Gambar 2.12 Indeks Keamanan Informasi Sulawesi Barat Tahun 2022- 2024.....	74
Gambar 3.1 Pohon Kinerja	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai	17
Tabel 2.2 Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia	18
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2.5 Kondisi Aset Modal.....	22
Tabel 2.4 Bobot Penilaian Indikator Indeks SPBE.....	56
Tabel 2.5 Predikat Indikator Indeks SPBE	57
Tabel 2.6 Dimensi dan Variabel Perhitungan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)	61
Tabel 2.7 Kriteria Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik (IPS).....	66
Tabel 2.8 Hierarki Domain, Aspek, dan Indikator Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	67
Tabel 2.9 Predikat Penilaian Tingkat Kematangan.....	70
Tabel 2.10 Indeks Keamanan Informasi Sulawesi Barat Tahun 2022- 2024.....	74
Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024	77
Tabel 2.12 Pemetaan Permasalahan	81
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Prov. Sulawesi Barat 2025-2029.....	90
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat.....	93
Tabel 3.3 Perumusan Program Prioritas	96
Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	98
Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	113
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama PD	116
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan mandat pembangunan daerah dan perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Secara definitif, Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2025–2030 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 ke dalam peran dan kontribusi setiap perangkat daerah. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran sentral dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, keterbukaan informasi publik, pengembangan statistik sektoral, serta pengamanan informasi pemerintah daerah melalui layanan persandian.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 ini didasarkan pada pendekatan teknokratik, yakni mengedepankan hasil kajian dan analisis berbasis data dan bukti. Pendekatan normatif, yakni berpedoman pada regulasi dan dokumen perencanaan yang berlaku. Pendekatan analitis, yang melihat isu-isu strategis yang memengaruhi kinerja dan tantangan ke depan. Serta pendekatan kontekstual, yang mempertimbangkan dinamika lokal di Provinsi Sulawesi Barat, termasuk perkembangan teknologi digital, transformasi sistem pemerintahan elektronik (SPBE), dan kebutuhan penguatan sistem statistik daerah (SSD) serta keamanan informasi.

Penyusunan Renstra juga merespons tuntutan masyarakat akan layanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Di tengah perubahan sosial yang didorong oleh digitalisasi, peran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian menjadi semakin strategis, tidak hanya sebagai penyedia infrastruktur dan layanan TIK, tetapi juga sebagai penggerak utama transformasi digital pemerintahan daerah dan pusat integrasi data pembangunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipergunakan dan masih relevan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
18. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
19. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 129);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 126); dan

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 130).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai upaya untuk menyediakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang terukur, sistematis, dan berbasis kinerja, guna mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian pada periode lima tahun ke depan. Renstra ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian tetap berada dalam koridor arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029, yang diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 serta arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, termasuk implementasi reformasi birokrasi digital, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dan pengembangan Satu Data Indonesia (SDI) di daerah.

Adapun tujuan utama dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 ini adalah untuk:

1. Menyediakan arah strategis dan prioritas kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 2025–2029 secara terarah, sistematis, dan berorientasi hasil.

2. Menjamin keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 dan dokumen perencanaan lainnya.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

➤ **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang penyusunan berupa gambaran kondisi yang mendasari penyusunannya, identifikasi terhadap dasar hukum penyusunan yang relevan dan signifikan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

➤ **Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini menguraikan gambaran pelayanan perangkat daerah yang meliputi: (i) tugas fungsi dan struktur perangkat daerah, (ii) sumber daya perangkat daerah, (iii) kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah; dan (iv) kelompok sasaran layanan perangkat daerah, serta menguraikan permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

➤ **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

Bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah.

➤ **Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah, serta target kinerja pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

➤ **Bab V Penutup**

Bab ini berisikan pedoman transisi, kaidah pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian yang menjadi tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, serta mempunyai fungsi:

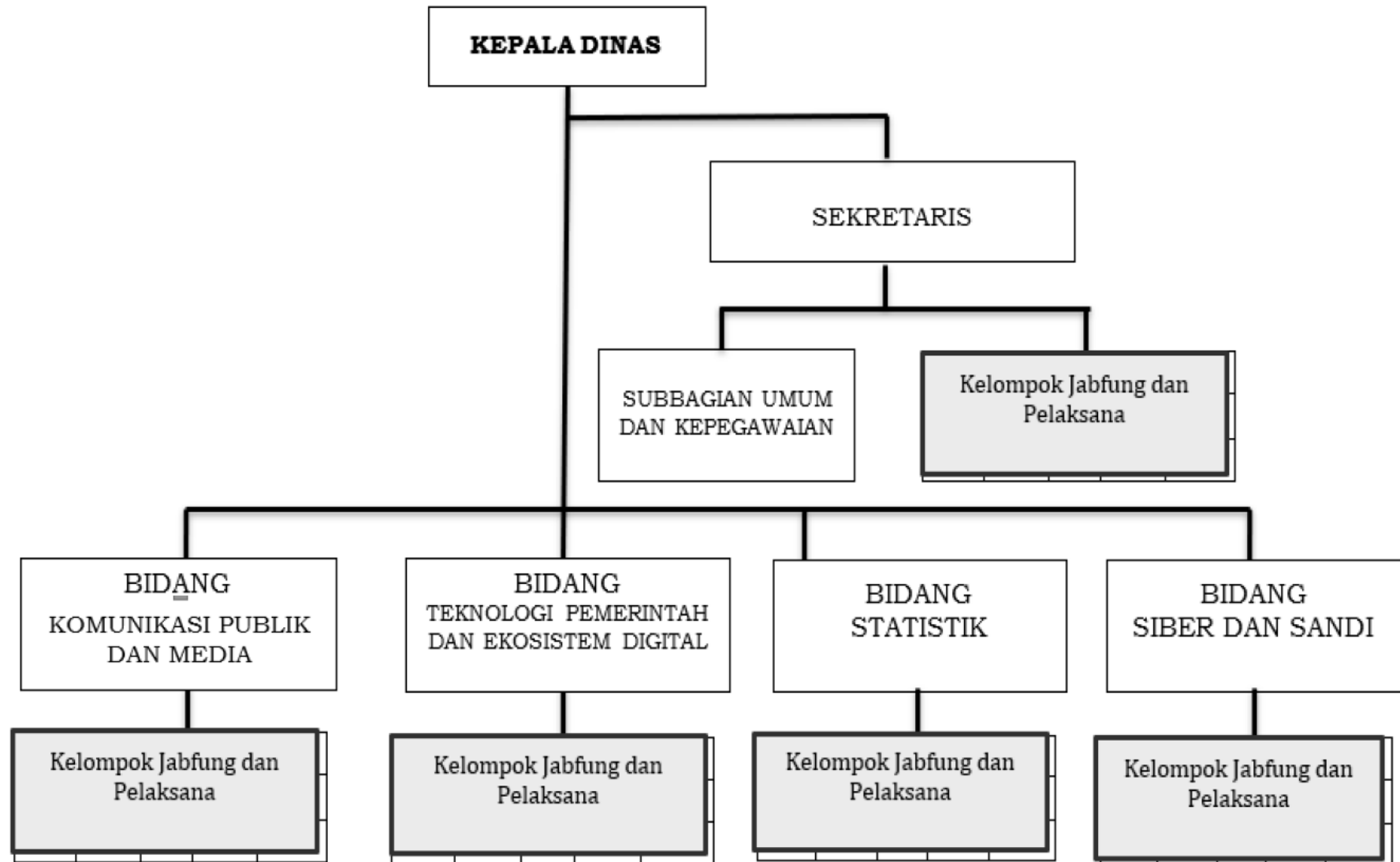
1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, dan statistik;
2. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Daerah; dan
4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas:

1. Sekretariat;
2. Bidang Komunikasi Publik dan Media;
3. Bidang Teknologi Pemerintah dan Ekosistem Digital
4. Bidang Statistik; dan
5. Bidang Siber dan Sandi.

Adapun Struktur bagan organisasi sebagaimana Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian



Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a. Tugas:

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian meliputi Informasi dan komunikasi publik, teknologi pemerintah dan ekosistem digital, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk sekretariat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Fungsi:

- 1) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, dan statistik;
- 2) penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian;
- 3) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Daerah; dan
- 4) penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Tugas:

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah.

b. Fungsi:

- 1) pengoordinasian Perencanaan dan Program dan kegiatan dinas;
- 2) penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program dinas;
- 3) penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

keuangan, kepegawaian, kerumahtanggan, kerjasama, umum, hukum, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi lingkup dinas;

- 4) penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional dan pelaksana;
- 5) penyelenggaraan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan lingkungan dinas;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi lingkup dinas;
- 7) pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan rancangan perundang-undangan, fasilitasi penanganan tindak lanjut temuan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengelolaan perpustakaan di lingkup dinas;
- 8) pengoordinasian dan pengelolaan administrasi umum penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup dinas;
- 9) pengendalian dan pengelolaan dokumen, inventaris, dan aset organisasi serta pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
- 10) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kesekretariatan;
- 11) penyelenggara koordinasi dengan unit kerja terkait di luar dinas dalam urusan kesekretariatan;
- 12) penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan kebijakan pimpinan;
- 13) penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
- 14) penyelenggaraan fasilitasi pelayanan informasi publik;
- 15) penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan;
- 16) penyelenggaraan perumusan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik;

- 17) melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi, keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi Provinsi; dan
- 18) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

3. Bidang Komunikasi Publik dan Media

a. Tugas:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Publik, meliputi pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik, dan kemitraan komunikasi.

b. Fungsi:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan dan pengkajian kebijakan teknis pengelolaan informasi komunikasi publik;
- 2) penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan informasi komunikasi publik;
- 3) penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan Bidang Informasi Komunikasi Publik;
- 4) penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Bidang Informasi Komunikasi Publik;
- 5) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Informasi Komunikasi Publik; dan
- 6) penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Informasi Komunikasi Publik;
- 7) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis informasi komunikasi publik;
- 8) penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi bidang Komunikasi Informatika, aspek Informasi Komunikasi Publik meliputi pengelolaan informasi, komunikasi publik dan kehumasan dan kemitraan komunikasi;
- 9) penyelenggaraan pengelolaan informasi dan konten melalui website dan media sosial resmi Pemerintah;
- 10) penyelenggaraan komunikasi Pemerintahan dan layanan komunikasi resmi Pemerintah Daerah Provinsi;

- 11) penyelenggaraan layanan informasi publik melalui pelaksanaan fungsi PPID dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 12) penyelenggaraan fasilitasi kegiatan dan pemberdayaan Komunitas Komunikasi Informatika;
- 13) penyelenggaraan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Informasi Komunikasi Publik;
- 14) penyelenggaraan pengkajian bahan verifikasi rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial bidang Informasi Komunikasi Publik;
- 15) penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 16) penyelenggaraan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang informasi dan komunikasi publik sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- 17) penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Informasi Komunikasi Publik;
- 18) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Informasi Komunikasi Publik; dan
- 19) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Bidang Teknologi Pemerintah dan Ekosistem Digital

a. Tugas:

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, meliputi tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan aplikasi, sistem dan jaringan sumber daya teknologi informatika, infrastruktur serta Pengelolaan informasi digital dan Data Elektronik.

b. Fungsi:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan dan pengkajian kebijakan Bidang Teknologi Pemerintah dan Ekosistem Digital;
- 2) penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan Bidang Teknologi Pemerintah dan Ekosistem Digital;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Teknologi Pemerintah dan Ekosistem Digital;

- 4) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Teknologi Pemerintah dan Ekosistem Digital;
- 5) pelaksanaan administrasi di Bidang Teknologi Pemerintah dan Ekosistem Digital; dan
- 6) penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Statistik

a. Tugas:

Melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan data statistik sektoral.

b. Fungsi:

- 1) menyusun rencana kegiatan kerja Bidang Statistik;
- 2) menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja,
- 3) perumusan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi kepala dinas;
- 4) mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada kepala dinas;
- 5) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan membagi peran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- 6) menyelenggarakan pengelolaan portal data dan statistik, aplikasi survei daerah serta analisis kebijakan sektoral;
- 7) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) merumuskan kebijakan teknis statistik;
- 9) melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan statistik;
- 10) mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan, analisa, dan publikasi data statistik ;
- 11) mengkoordinasikan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi Daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis Daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah;

- 12) mengkoordinasikan penghimpunan dan penyusunan bahan untuk informasi dan publikasi kegiatan statistik;
- 13) memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada kepala dinas;
- 14) melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- 15) menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada kepala dinas;
- 16) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana; dan
- 17) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Bidang Siber dan Sandi

a. Tugas:

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, mengevaluasi, pengawasan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang persandian, keamanan informasi dan keamanan siber.

b. Fungsi:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Siber dan Sandi;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Siber dan Sandi;
- 3) pelaksanaan penyiapan peningkatan sumber daya manusia terkait tata kelola, layanan dan pengendalian di Bidang Siber dan Sandi;
- 4) pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Siber dan Sandi;
- 5) penyiapan perumusan dan melaksanakan kebijakan tata kelola keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah;

- 6) penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Siber dan Sandi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) penyusunan arsitektur keamanan Siber dan Sandi;
- 8) penyelenggaraan sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik serta perlindungan data dan dokumen elektronik;
- 9) pelaksanaan penerbitan, pembaharuan dan pencabutan sertifikat elektronik;
- 10) pelaksanaan literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi;
- 11) pelaksanaan fasilitasi pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 12) pelaksanaan koordinasi dan penerapan sistem keamanan siber dan sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 13) penyusunan dan pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi;
- 14) pelaksanaan penilaian risiko keamanan sistem elektronik;
- 15) pembentukan dan pelaksanaan Pusat Layanan keamanan Informasi dan Siber (Security Operation Center (SOC));
- 16) pemberian layanan koordinasi dan konsultasi keamanan informasi bagi pengguna;
- 17) pelaksanaan perlindungan informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi dan sinyal;
- 18) pelaksanaan perlindungan informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
- 19) pelaksanaan identifikasi, analisis, deteksi, proteksi kerentanan pada sistem elektronik;
- 20) pelaksanaan penanggulangan, pemulihan dan mitigasi insiden keamanan siber;
- 21) pelaksanaan audit sistem manajemen keamanan informasi;
- 22) pelaksanaan forensik digital insiden keamanan siber;
- 23) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Subbagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas:

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- 3) melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan sistem informasi kepegawaian;
- 4) melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui sistem informasi kepegawaian;
- 5) pelaksanaan administrasi umum penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup dinas;
- 6) melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- 7) melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- 8) melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- 9) melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 10) melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang Daerah dinas;
- 11) melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan barang Daerah;
- 12) melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis; dan
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia aparatur memegang peran sebagai jantung penggerak birokrasi. Di tangan para ASN inilah kebijakan diterjemahkan menjadi pelayanan, program diwujudkan menjadi tindakan, dan arah pembangunan daerah memperoleh bentuk yang nyata. Kualitas aparatur bukan sekadar deretan angka dalam tabel kepegawaian, tetapi cermin dari kapasitas pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan. Dalam konteks pemerintahan daerah, keberadaan aparatur yang kompeten, berintegritas, dan

adaptif menjadi fondasi penting untuk menghadirkan tata kelola yang efektif. Mereka adalah para pengawal data, informasi, administrasi, dan pelayanan publik yang setiap hari menjaga roda organisasi tetap bergerak. Karena itu, pemetaan dan penguatan sumber daya manusia aparatur bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan strategi kunci untuk meningkatkan kinerja kelembagaan secara berkelanjutan.

2.2.1 Kondisi SDM Aparatur

Tabel 2.1 menunjukkan jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin. Secara keseluruhan, total pegawai berjumlah 69 orang. Dari jumlah tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan kelompok terbesar dengan total 62 orang, terdiri atas 36 laki-laki dan 26 perempuan. Sementara itu, pegawai dengan status PPPK berjumlah 7 orang, terdiri atas 3 laki-laki dan 4 perempuan. Adapun Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada tahun pelaporan ini tercatat tidak ada.

Data tersebut menunjukkan bahwa komposisi pegawai masih didominasi oleh PNS, dengan proporsi jenis kelamin yang relatif berimbang. Selain itu, keberadaan PPPK mulai menunjukkan kontribusi dalam struktur SDM perangkat daerah, meskipun jumlahnya masih terbatas. Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan kondisi sumber daya manusia yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai

ASN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PNS	36	26	62
PPPK	3	4	7
PTT	0	0	0
Jumlah			69

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 2.2 menggambarkan komposisi pegawai berdasarkan kelompok usia pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat. Total keseluruhan pegawai berjumlah 69 orang, yang terbagi dalam tiga kelompok usia produktif dan pra-pensiun. Kelompok usia lebih dari

50 tahun berjumlah 10 orang, menunjukkan proporsi pegawai yang telah berada pada fase senior dalam masa kerja. Sementara itu, kelompok usia 41–50 tahun merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 37 orang, yang mencerminkan dominasi pegawai pada masa matang karier dan memiliki pengalaman teknis maupun manajerial yang kuat.

Adapun pegawai dengan usia 40 tahun ke bawah berjumlah 22 orang, menggambarkan keberadaan generasi yang lebih muda dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta inovasi pelayanan publik. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur usia pegawai masih cukup ideal, dengan keseimbangan antara pegawai berpengalaman dan pegawai yang berada pada fase usia produktif awal. Kombinasi ini menjadi modal penting dalam mendukung kinerja organisasi, terutama terkait transformasi digital, penguatan statistik, dan layanan persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.2 Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	Jumlah
> 50 Tahun	10
41 – 50 Tahun	37
≤ 40 Tahun	22
Jumlah	69

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat

Tabel mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) dengan jumlah 38 orang. Hal ini menandakan bahwa kapasitas intelektual pegawai berada pada tingkat yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan. Selain itu, terdapat 14 pegawai berpendidikan S2, serta 1 orang berpendidikan S3, yang memperkuat kualitas perencanaan, analisis, dan manajemen program. Pegawai berpendidikan D3 sebanyak 6 orang, sementara pegawai berpendidikan SMA berjumlah 10 orang, yang umumnya mengisi posisi teknis atau administratif. Secara keseluruhan, komposisi tingkat pendidikan ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola tugas-tugas

pemerintahan melalui SDM dengan jenjang pendidikan yang beragam namun saling melengkapi.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S3	1
S2	14
S1	38
D3	6
SMA	10
Jumlah	69

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 2.4 menyajikan distribusi pegawai berdasarkan golongan, eselon, serta jabatan fungsional pada perangkat daerah. Berdasarkan golongan kepangkatan, mayoritas pegawai berada pada Golongan III, yaitu sebanyak 37 orang, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada jenjang karier menengah yang umumnya memiliki pengalaman dan kompetensi teknis yang cukup kuat. Sementara itu, Golongan IV berjumlah 11 orang, yang mencerminkan keberadaan pegawai pada jenjang struktural atau fungsional tingkat lanjutan. Pegawai pada Golongan II tercatat sebanyak 14 orang, sedangkan pegawai dengan status PPPK yang setara Golongan IX berjumlah 7 orang.

Pada struktur Eselon, kondisi kepegawaian menunjukkan bahwa hanya sedikit pegawai yang menduduki jabatan struktural. Pegawai Eselon II berjumlah 1 orang, Eselon III sebanyak 5 orang, dan Eselon IV sebanyak 1 orang. Komposisi ini mencerminkan struktur organisasi yang lebih banyak bertumpu pada jabatan pelaksana atau fungsional dibandingkan jabatan struktural. Selain itu, tabel juga menunjukkan keberadaan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 33 orang. Hal ini menegaskan bahwa organisasi semakin mengarah pada penguatan jabatan fungsional sebagai bagian dari profesionalisasi aparatur, sesuai kebijakan reformasi birokrasi yang mendorong peran efektif fungsional dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah. Secara keseluruhan, struktur golongan dan jabatan ini menggambarkan profil sumber daya manusia yang relatif berimbang antara tenaga pelaksana terampil, tenaga

profesional fungsional, serta struktur manajerial pada level eselon, yang secara keseluruhan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Eselon

Spesifikasi		Jumlah
Golongan	IV	11
	III	37
	II	14
	PPPK / IX	7
Eselon	II	1
	III	5
	IV	1
Jabatan Fungsional Tertentu		33

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat

Secara keseluruhan, komposisi ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan struktur yang cukup proporsional dan profesional, baik dari pendidikan, status kepegawaian, maupun jabatan, sehingga dapat menunjang kinerja dinas dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian secara efektif dan berkelanjutan.

2.2.1 Kondisi Aset Modal

Kondisi aset modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Aset modal yang dimiliki oleh perangkat daerah tidak hanya mencerminkan kapasitas fisik dan operasional organisasi, tetapi juga menjadi indikator efektivitas pengelolaan sumber daya serta kemampuan daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, pengelolaan aset modal harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan.

Secara umum, aset modal mencakup berbagai jenis barang milik daerah seperti gedung kantor, peralatan dan mesin, infrastruktur teknologi informasi, kendaraan operasional, hingga aset penunjang lainnya. Keberadaan aset–aset ini sangat menentukan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat

daerah, baik dalam aspek administratif, pelayanan publik, maupun operasional teknis. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas aset modal menjadi perhatian penting mengingat dinamika kebutuhan organisasi yang terus berkembang. Aset yang berada dalam kondisi baik akan meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pelayanan, serta memberikan kenyamanan bagi pegawai maupun masyarakat.

Sebaliknya, aset yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan gangguan operasional, meningkatkan biaya pemeliharaan, serta menurunkan produktivitas. Melalui penyajian data dan analisis kondisi aset modal ini, perangkat daerah diharapkan mampu memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kecukupan, kualitas, dan tingkat pemanfaatan aset yang dimiliki. Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat, baik dalam perencanaan pengadaan, peningkatan kapasitas, maupun pengelolaan aset secara berkelanjutan.

Tabel 2.5 Kondisi Aset Modal

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sepeda Motor	SUZUKI / SHOGUN	MH8FD-125X6J-755266	Besi	Pembelian	2005	125		Baik	1	7.850.000,00
Sepeda Motor Lemari Besi/Metal Lemari Kayu Lemari Kayu A.C. Split Dispenser Meja Kerja Pegawai Non Struktural Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Suzuki / Shogun - Lokal Lokal - Miyako Den Panel Lokal -	MH8FD125X125XSD - - - - -	Besi Kayu Kayu Besi/Fiber Plastik Kayu Kayu	Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian	2006 2006 2006 2006 2006 2006	125 1/2 Biro		Baik Rusak Berat Baik Rusak Berat Baik Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat	1 2 1 1 1 1	9.850.000,00 2.400.000,00 1.850.000,00 1.200.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00
Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Lemari Besi/Metal Filing Cabinet Besi Televisi Unit Pemancar VHF/FM Stationary peralatan pemancar vhf/ftm lainnya (dst) switcher/menara antena lainnya (dst) Lap Top	SUZUKI / Shogun Suzuki Shogun / Fd 125XSD Suzuki Shogun / 125 Brother Brother Sharp - Pemancar Relay FM Lokal Thosiba -	MH8FD.125X6J.7467484 MH8BF45CA9J-161552 MH8FD125X6J749384 - - - - - -	Besi Besi Besi Besi Fiber Besi Besi Fiber	Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian	2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007	125 125 cc 125 cc 5000 Watt 160 watt 60 m		Baik Baik Baik Rusak Berat Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Berat	1 1 1 1 1 1 1 1	13.500.000,00 13.350.000,00 13.350.000,00 1.540.000,00 1.602.000,00 2.158.000,00 300.000.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00 14.128.000,00
Sepeda Motor Filing Cabinet Besi Filing Cabinet Besi Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Audio Processor Am	SUZUKI / THUNDER Brother Aristo Sharp / Mini Compo DBX Sound -	MH8EN125A8J-495792 - - - -	Besi Besi Besi Fiber	Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian	2008 2008 2008 2008			Rusak Berat Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik	1 1 1 1	15.455.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 1.000.000,00 15.000.000,00
Sepeda Motor Kursi Kerja Pejabat lainnya Lensa Kamera Peralatan Jaringan lainnya	suzuki Lokal / Kursi 1/2 biro Nikon / 70-200/2,8VR -	FD125X6J750990 - - -	Busa Fiber	Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian	2009 2009 2009 2009	-		Baik Baik Baik Baik	1 2 1 1	13.500.000,00 2.000.000,00 35.000.000,00 75.653.000,00
Handy Cam Tripod Camera Server	Sony / HDR FX1000 Sony / VCT 80AV (Remote Control) -	- - -	Fiber Besi Besi	Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian	2010 2010 2010			Baik Baik Baik	1 1 1	68.106.236,00 4.089.272,00 93.444.323,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kursi Besi/Metal	Chitose	-	Besi/Busa	Pembelian	2012			Baik	10	6.000.000,00
Meja 1/2 Biro	Lokal	-	kayu	Pembelian	2012			Baik	1	3.000.000,00
Kursi Rapat	Lokal	-	Besi	Pembelian	2012			Baik	6	3.537.684,00
Kursi Putar	-	-	Besi / Busa	Pembelian	2012			Baik	4	5.000.000,00
A.C. Window	Kristal	-	Campuran	Pembelian	2012	1,5 Pk		Rusak Berat	2	14.500.000,00
Kipas Angin	-	-	Besi	Pembelian	2012			Rusak Berat	1	1.250.000,00
Alat Dapur lainnya	-	-	Besi	Pembelian	2012			Baik	1	1.500.000,00
Televisi	Toshiba	-	Campuran	Pembelian	2012	19 Inci		Rusak Berat	12	29.400.000,00
Televisi	Samsung	-	Fiber	Pembelian	2012	29"		Rusak Berat	2	7.000.000,00
Televisi	Samsung / LCD	-	Fiber	Pembelian	2012			Rusak Berat	1	24.500.000,00
Sound System	- / -	-	Fiber	Pembelian	2012			Rusak Berat	1	1.133.888,00
Sound System	-	-	Fiber	Pembelian	2012			Kurang Baik	1	1.133.888,00
Wireless	-	Ubi Quitif	Besi/Fiber	Pembelian	2012			Baik	1	2.647.362,00
Dispenser	Sanken	-	Plastik	Pembelian	2012			Rusak Berat	1	1.100.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dispenser	Miyako	-	Plastik	Pembelian	2012			Rusak Berat	2	4.800.000,00
Handy Cam	Sony / P1V	-	Fiber	Pembelian	2012			Baik	1	41.994.059,00
Meja Kerja Pejabat Eselon III	VIP	-	Kayu	Pembelian	2012	1 Biro		Baik	1	1.750.000,00
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	-		Pembelian	2012			Baik	2	1.500.000,00
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Lokal	-	kayu	Pembelian	2012	1/2 Biro		Rusak Berat	7	11.200.000,00
Meja Operator	Lokal	-	Kayu	Pembelian	2012			Baik	1	8.000.000,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	-	Besi / Busa	Pembelian	2012			Baik	1	1.500.000,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	-	Besi / Busa	Pembelian	2012			Baik	1	3.000.000,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Racuda	-	Besi / Busa	Pembelian	2012			Baik	5	3.250.000,00
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	Besi / Busa	Pembelian	2012			Kurang Baik	5	6.000.000,00
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	lokal	-	Kayu	Pembelian	2012			Baik	1	28.820.000,00
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	-	-	Kayu	Pembelian	2012	2 Pintu		Rusak Berat	1	5.900.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dinamis										
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	Lemari arsip	-	-	Pembelian	2012	-		Baik	2	6.388.955,59
Dinamis										
Audio Monitor Active	Digiplis / Audio Monitor Aktive	-	Campuran	Pembelian	2012			Rusak Berat	2	9.030.000,00
Telephone Hybrid	-	-	Fiber	Pembelian	2012			Rusak Berat	1	5.669.440,00
peralatan studio audio lainnya (dst)	-	-	Fiber	Pembelian	2012			Rusak Berat	2	2.267.776,00
Mixer PVC	-	-	besi	Pembelian	2012			Rusak Berat	1	43.154.740,00
Layar Film/Projector	Epson	-	Besi/Fiber	Pembelian	2012			Baik	1	14.420.990,00
Alat Studio Video Lainnya	cyber / Alat	-	Campuran	Pembelian	2012			Rusak Berat	2	17.900.000,00
	Perekam Siaran									
Alat Studio Video Lainnya	Starcom / Alat	-	Campuran	Pembelian	2012			Rusak Berat	1	5.300.000,00
	Penerima Siaran									
Facsimile	Panasonic	-	Campuran	Pembelian	2012			Baik	1	1.770.000,00
alat komunikasi sosial lainnya (dst)	-	-	besi	Pembelian	2012			Kurang Baik	3	10.204.992,00
alat komunikasi sosial lainnya (dst)	-	-	Fiber	Pembelian	2012			Kurang Baik	2	11.338.880,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
peralatan pemancar vhf/fm lainnya (dst)	- / -	-	Besi	Pembelian	2012			Baik	1	46.035.847,00
P.C Unit	LG	-		Pembelian	2012			Rusak Berat	2	13.300.000,00
P.C Unit	IENOVO	-	Besi/Fiber	Pembelian	2012			Baik	1	6.994.906,00
P.C Unit	LG	-	Fiber	Pembelian	2012			Rusak Berat	1	5.000.000,00
P.C Unit	LG	-	Fiber	Pembelian	2012			Baik	2	21.100.000,00
Lap Top	Acer	-	Fiber	Pembelian	2012			Rusak Berat	1	10.000.000,00
Note Book	Thosiba / Satellite C840	9C053546	campuran	Pembelian	2012	12 Inci		Rusak Berat	1	4.900.000,00
Note Book	Thosiba / Satellite L730	2C334934W	campuran	Pembelian	2012	12 Inci		Rusak Berat	1	6.555.000,00
Printer Personal (Peralatan Komputer)	Epson	-	Besi/Fiber	Pembelian	2012			Baik	1	2.759.089,00
Printer Personal (Peralatan Komputer)	Canon / MP280	-	Campuran	Pembelian	2012			Rusak Berat	1	975.000,00
Printer Personal (Peralatan Komputer)	Canon / IP2770	-	Campuran	Pembelian	2012			Rusak Berat	1	600.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Printer Personal (Peralatan Komputer)	Canon / Scan Copy	-	Fiber	Pembelian	2012			Rusak Berat	2	2.300.000,00
Printer Personal (Peralatan Komputer)	epson L 110 / Printer Infus	-		Pembelian	2012			Baik	1	2.200.000,00
Server	-	-	Besi	Pembelian	2012			Baik	1	8.000.000,00
Server	-	-	Besi	Pembelian	2012			Baik	1	205.000.000,00
Peralatan Jaringan lainnya	-	-		Pembelian	2012			Rusak Berat	1	5.550.000,00
Peralatan Jaringan lainnya	-	-		Pembelian	2012			Baik	1	88.506.000,00
Genset	Maxtron	-	Besi	Pembelian	2013			Baik	1	83.567.250,00
Komputer Jaringan lainnya	-	-	Besi/Fiber	Pembelian	2013			Baik	2	115.559.544,00
P.C Unit	Inovo / B3 Series	-	Besi/Fiber	Pembelian	2013			Baik	8	72.694.184,00
P.C Unit	-	-	Besi / Fiber	Pembelian	2013			Baik	2	30.000.000,00
Lap Top	Toshiba / satellite L730	-	Campuran	Pembelian	2013	14 INCI		Baik	8	49.160.000,00
Printer Personal (Peralatan Komputer)	Laser Jet / M 1132 MFP	-	Besi/Fiber	Pembelian	2013			Baik	1	2.453.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Ip3680	-	Campuran		Pembelian	2013			Rusak Berat	2
Server	-	-	Besi		Pembelian	2013			Baik	1
Router	Mangable	-	Besi/Fiber		Pembelian	2013			Baik	1
Router (Komputer)	-	-	Besi/Plastik		Pembelian	2013			Baik	1
Printer (Peralatan Personal Komputer)	PRINTER WARNA	-		Pembelian	2014			Baik	1	3.410.000,00
	Epson L355 / Epson L355									
Peralatan Personal Komputer lainnya	ICA / CT. 1082B	-		Pembelian	2014			Baik	1	4.171.750,00
Peralatan Jaringan lainnya	- / -	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	5	13.555.835,00
Peralatan Jaringan lainnya	- / -	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	1	2.711.165,00
Peralatan Jaringan lainnya	TP-Link	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	6	16.233.000,00
Peralatan Jaringan lainnya	- / Rack Server	-	Besi	Pembelian	2014			Baik	1	50.025.000,00
Peralatan Jaringan lainnya	Cisco	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	1	30.995.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Hard Disk	Soulgate / -	-	Fiber	Pembelian	2015	-		Baik	1	1.000.000,00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L120	-	Fiber	Pembelian	2015	-		Baik	1	2.672.037,00
Meja Rapat	Lokal	-	Kayu	Pembelian	2016			Baik	2	11.278.162,00
Meja Rapat	Lokal	-	Kayu	Pembelian	2016			Baik	6	38.676.000,00
Meja Panjang	lokal	-	kayu	Pembelian	2016			Baik	1	5.500.000,00
Sofa	Procella	-	busa	Pembelian	2016			Baik	1	4.500.000,00
Lemari Es	LG	-	FIBER	Pembelian	2016			Baik	1	4.500.000,00
A.C. Window	Polytron	-	Campuran	Pembelian	2016	1,5 pk		Baik	1	6.679.934,00
A.C. Window	Polytron AW1426	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik	3	19.500.000,00
A.C. Window	Midea	-	Besi/Fiber	Pembelian	2016	5 PK		Baik	1	30.676.000,00
Radio	FLT	-	Campuran	Pembelian	2016			Baik	1	4.632.455,00
Televisi	SHARP AQUOS	-	FIBER	Pembelian	2016			Baik	2	9.500.000,00
Sound System	-	-	Besi	Pembelian	2016			Baik	1	34.155.000,00
Wireless	ubi quity	-	besi/fiber	Pembelian	2016			Baik	1	3.450.000,00
Microphone Table Stand	Anysong / PMM 7100D Plus	-	Fiber/Besi	Pembelian	2016			Baik	15	27.390.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Camera Video	Canon / EOS	-	Campuran	Pembelian	2016			Baik	1	9.244.321,00
	DSLR									
Camera Video	CANON 1200 D	-	PLASTIK	Pembelian	2016			Baik	1	3.200.000,00
Camera Video	-	-	fiber	Pembelian	2016			Baik	1	34.108.153,00
Camera Video	-	-	Fiber Kaca	Pembelian	2016			Baik	1	15.031.280,00
Dispenser	Miyako	-	Campuran	Pembelian	2016			Baik	1	812.224,00
Dispenser	miyako	-	plastik	Pembelian	2016			Baik	2	3.500.000,00
Meja Kerja Pejabat Eselon III	lokal	-	kayu	Pembelian	2016			Baik	6	18.000.000,00
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	lokal	-	Kayu	Pembelian	2016			Baik	2	7.177.012,00
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	-	Kayu	Pembelian	2016			Baik	1	3.588.506,00
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	-	kayu	Pembelian	2016			Baik	5	10.000.000,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Matrix / Putar	-	Campuran	Pembelian	2016			Baik	3	6.151.725,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	lokal	-	kayu	Pembelian	2016			Baik	1	2.250.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Matrix / Putar	-	Campuran	Pembelian	2016			Baik	2	4.101.150,00
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	-	busa	Pembelian	2016			Baik	12	12.000.000,00
Audio Master Control Unit	Yamaha / MG 10	-		Pembelian	2016			Baik	1	8.855.000,00
	XU									
Uninterruptible Supply (UPS)	UPS APC / Smart	-	Campuran	Pembelian	2016			Baik	1	19.644.112,00
	UPS X 1500									
Uninterruptible Supply (UPS)	APC /	-	BESI/FIBER	Pembelian	2016			Baik	1	15.390.248,00
	SMC3000RMI2U									
Video Tape Recorder Stationer	Video Encoder 8	-	Campuran	Pembelian	2016			Baik	1	47.603.199,00
	Canell Vivotex /									
	Full Function									
Video Tape Recorder Stationer	Network	-	Campuran	Pembelian	2016			Baik	1	3.428.959,00
	Swit/Hub Tp-Link									
	/ Combo SFP									
	Port									
Layar Film/Projector	BENQ MS506	-	BESI	Pembelian	2016			Baik	1	6.200.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Local Area Network (LAN)	Accesoris	-	Karet/Tima	Pembelian	2016			Baik	1	4.254.080,00
	Instalasi									
	Hardware									
P.C Unit	Lenovo	FOB2		Pembelian	2016	21 inci		Baik	1	13.034.199,00
P.C Unit	Lenovo	FOB2		Pembelian	2016	21 inci		Baik	1	13.034.199,00
P.C Unit	Lenovo FOB3	-	FIBER	Pembelian	2016			Baik	2	16.000.000,00
P.C Unit	Lenovo / All in One PC	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik	1	9.649.655,00
Lap Top	Asus	A445L	Campuran	Pembelian	2016	14 inci		Baik	1	11.964.987,00
Lap Top	Asus	A445L	Campuran	Pembelian	2016	14 Inci		Baik	1	11.964.987,00
Lap Top	ASUS A455L	-	FIBER	Pembelian	2016			Baik	3	39.000.000,00
Hard Disk	Toshiba	-	Campuran	Pembelian	2016			Baik	2	1.598.726,00
Hard Disk	WD Elements	-	Besi	Pembelian	2016			Baik	1	1.221.769,00
Printer Personal (Peralatan Komputer)	Canon Pixma / MP 287	-	Campuran	Pembelian	2016			Baik	3	9.622.905,00
Printer Personal (Peralatan Komputer)	CANON MP287	-	PLASTIK	Pembelian	2016			Baik	3	7.500.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L120	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik	1	2.550.003,00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Laser Jet P1102	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik	1	2.057.119,00
Server	HP HDD / Processor Intel Xeon E5	-	Campuran	Pembelian	2016			Baik	1	44.775.440,00
Router	Router Mikrotik / RB 1100Ahx2 1U	-	Campuran	Pembelian	2016			Baik	1	7.897.868,00
Router	mikrotik	-	Besi/fiber	Pembelian	2016			Baik	1	19.075.000,00
Peralatan Jaringan lainnya	SMS Gateway / 1Simcard	-	Campuran	Pembelian	2016			Baik	1	1.860.440,00
Peralatan Jaringan lainnya	Network Video Recorder / Quad Core	-	Campuran	Pembelian	2016			Baik	1	46.038.077,00
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Meja Kerja	-	kayu	Pembelian	2017			Baik	11	27.192.902,00
	Pejabat eselon IV									
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Meja Kerja	-	kayu	Pembelian	2017			Baik	1	2.472.081,00
	Pejabat eselon IV									

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Meja Kerja Staf	-	kayu	Pembelian	2017			Baik	42	83.995.170,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	kursi kerja	-	fyber	Pembelian	2017			Baik	1	5.025.485,00
	pejabat eselon II									
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	kursi kerja	-	fyber	Pembelian	2017			Baik	4	9.604.260,00
	pejabat eselon II									
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	kursi kerja	-	fiber	Pembelian	2017			Baik	12	24.122.328,00
	pejabat eselon IV									
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Kursi Staf	-	fyber	Pembelian	2017			Rusak Berat	1	1.217.284,00
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Kursi Staf	-	fyber	Pembelian	2017			Baik	41	49.908.644,00
Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	kursi rapat	-	fyber	Pembelian	2017			Baik	10	14.998.500,00
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	kursi tamu	-	kayu	Pembelian	2017			Baik	1	15.895.500,00
Tripod Camera	PLASTIC TRIPOD / SAB264	-	PLASTIK	Pembelian	2017			Baik	1	4.235.000,00
Tele Recorder	NIKON DX VR	-	PLASTIK	Pembelian	2017			Baik	1	20.735.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
P.C Unit	komputer /pc hp	-	aluminium/fy	Pembelian	2017			Baik	2	19.270.000,00
Personal Komputer lainnya	apel / macOSsierra	-	ber PLASTIK	Pembelian	2017	21-5 inc		Baik	1	24.090.000,00
Printer Personal (Peralatan Komputer)	printer / hp 2645	-	plastik	Pembelian	2017			Baik	1	1.610.000,00
Printer Personal (Peralatan Komputer)	Epson / L310	-	fiber	Pembelian	2017			Baik	1	2.165.072,00
Printer Personal (Peralatan Komputer)	printer epson L 365	-	fyber	Pembelian	2017			Baik	1	3.322.000,00
Printer Personal (Peralatan Komputer)	Printer Epson M565	-	fyber	Pembelian	2017			Baik	1	3.998.500,00
Peralatan Jaringan lainnya	kabal utp biden cet 6	-	aluminium	Pembelian	2017			Baik	1	2.300.000,00
Peralatan Jaringan lainnya	TP LINK	-	plastik	Pembelian	2017			Baik	1	975.000,00
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	meja eselon IV	-	KAYU	Pembelian	2018			Baik	1	2.307.840,00
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	MEJA STAF	-	KAYU	Pembelian	2018			Baik	2	4.013.636,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meja Rapat Pejabat lainnya	MEJA RAPAT	-	KAYU	Pembelian	2018			Baik	1	14.047.726,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	KURSI ESELON IV	-	FIBER	Pembelian	2018			Baik	1	2.006.818,00
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	KURSI STAF	-	FIBER	Pembelian	2018			Baik	2	2.599.440,00
Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	KURSI RAPAT	-	FIBER	Pembelian	2018			Baik	6	7.224.540,00
peralatan studio audio lainnya (dst)	INFOKUS LCD	-	FIBER	Pembelian	2018			Baik	1	7.825.608,00
alat laboratorium makanan lainnya (dst)	STORAGE	-	FIBER	Pembelian	2018			Baik	1	29.423.214,00
Distilling Apparatus	KOMPUTER PC LENOVO	-	FIBER	Pembelian	2018			Baik	6	59.700.000,00
Smoke Detecting System & Alarm	penangkal petir	-	besi	Pembelian	2018			Baik	1	5.000.000,00
Smoke Detecting System & Alarm	kunci sidik jari	-	fiber	Pembelian	2018			Baik	1	10.000.000,00
Simetri Cermin	CERMIN	-	KACA	Pembelian	2018			Baik	1	1.091.339,00
Printer Personal (Peralatan Komputer)	PRINTER CANON	-	FIBER	Pembelian	2018			Baik	6	13.500.000,00
Server	SERVER	-	FIBER	Pembelian	2018			Baik	2	250.000.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	-	-	Beton	Pembelian	2018		M2	Baik	1	196.410.000,00
Jaringan air minum lainnya	-	-	Handy Talkie	Pembelian	2018		M2	Baik	1	11.140.000,00
Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Besar	-	1400/352/dkips		Pembelian	2018	1		Baik	1	108.100.000,00
A.C. Split	DAIKIN	KO42386	-	Pembelian	2019			Baik	1	7.350.454,95
Camera Electronic	CANNON / EOS 80 D / EOS 80 D	278024001691	-	Pembelian	2019			Baik	1	23.067.000,00
Lensa Kamera	CANNON / WIDE	673967	-	Pembelian	2019			Baik	1	5.163.400,00
alat komunikasi telephone lainnya (dst)	-	-	-	Pembelian	2019			Baik	1	25.914.000,00
Tablet Machine	tablet samsung galaxy tab s6 / samsung galaxy tab s6	-		Pembelian	2019			Baik	1	15.140.000,00
Distiling Apparatus	asus pc intel core i5 / ASUS	-	FIBER	Pembelian	2019			Baik	2	20.500.000,00
Distiling Apparatus	pc lenovo A340 / LENOVO A340	-		Pembelian	2019			Baik	1	9.070.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
P.C Unit	Acer / Acer CDR	-	-	Pembelian	2019			Baik	2	18.101.500,00
Lap Top Lap Top Note Book Personal Komputer lainnya	laptop acer aspire intel core i3 / acer aspire intel core i3 Lenovo / Lenovo V130 DELL / MAXX AUDIO Scan / FUJITSU	- - - -	- - - -	Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian	2019 2019 2019 2019			Baik Baik Baik Baik	2 2 1 1	18.140.000,00 18.101.500,00 8.045.500,00 4.524.500,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer / Epson L1110	-	-	Pembelian	2019			Baik	4	14.077.000,00
Alat Studio Lainnya	recorder HEADSETBROCA STING	-	FIBER	Pembelian	2020			Baik	3	3.000.000,00
Alat Studio Lainnya	MIC WIRELESSS	-	FIBER/BESI	Pembelian	2020			Baik	1	5.000.000,00
alat komunikasi lainnya lainnya	TABLET IPAD	-	FIBER	Pembelian	2020			Baik	1	9.000.000,00
(dst)										
alat peraga praktek sekolah bidang	BATERAI DRONE	-	-	Pembelian	2020			Baik	1	2.500.000,00
studi : ipa lanjutan lainnya (dst)										
Lap Top	LAPTOP ASUS	-	-	Pembelian	2020			Baik	3	33.300.000,00
Lap Top	Laptop A sus	-	-	Pembelian	2020			Baik	2	21.200.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lap Top	Laptop Asus	-	-	Pembelian	2020			Baik	1	11.300.000,00
Lap Top	-	-	-	Pembelian	2020			Baik	1	32.500.000,00
Lap Top	MSI GL 6 9SFK	-	fiber	Pembelian	2020			Baik	1	29.000.000,00
Personal Komputer lainnya	core i7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KOMPUTER ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	-	Pembelian	2020			Baik	2	14.600.000,00
Personal Komputer lainnya	EDITING VIDEO	-	-	Pembelian	2020			Baik	1	14.812.000,00
Hard Disk	SATA	-	-	Pembelian	2020			Baik	2	3.300.000,00
Printer Personal (Peralatan Komputer)	EPSON	-	FIBER	Pembelian	2020			Baik	1	3.000.000,00
Server	DDR3 PC3L-10600R 16 GB	-	-	Pembelian	2020			Baik	17	23.730.963,00
Server	DDR3 Pc 3L-10600R 16 GB	-	-	Pembelian	2020			Baik	1	1.395.941,00
Router	Wireless routers tenda AC6	-	Plastik	Pembelian	2020			Baik	2	1.043.732,00
Kabel UTP	Kabel/cable UTP	-	Tembaga	Pembelian	2020			Baik	1	5.995.559,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wireless Access Point	UBNT	-	Plastik	Pembelian	2020			Baik	3	5.831.868,00
	UUBIQUITI									
	LBC-SAC-16-120									
	SECTORAL AP									
Wireless Access Point	Ubiquity	-	Plastik	Pembelian	2020			Baik	5	7.817.285,00
	litebeamAC23dbi									
	Gen2 LBE									
	SAC-Gen2									
Peralatan Komputer lainnya	software	-	fiber	Pembelian	2020			Baik	1	700.000,00
Bangunan gedung Tempat Kerja	-	-	Beton	Pembelian	2020		M2	Baik	1	50.000.000,00
Lainnya										
Mesin Fotocopy Lainnya	mesin fotocopy	-	FIBER BESI	Pembelian	2021			Baik	1	11.000.000,00
P.C Unit	PC DESKTOP	-	-	Pembelian	2021			Baik	1	52.800.000,00
Lap Top	ASUS	-	-	Pembelian	2021			Baik	1	17.928.500,00
Lap Top	ASUS	-	Fiber	Pembelian	2021			Baik	1	23.000.000,00
Printer Personal (Peralatan Komputer)	HP OFFICEJET	-	-	Pembelian	2021			Baik	2	8.000.000,00
Printer Personal (Peralatan Komputer)	EPSON	-	-	Pembelian	2021			Baik	1	5.000.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Printer Personal (Peralatan Komputer)	SCANER EPSON	-	-	Pembelian	2021			Baik	1	3.000.000,00
Scanner Personal (Peralatan Komputer)	EPSON	-	-	Pembelian	2021			Baik	1	7.000.000,00
Server	peralatan server dan alat kerja IT	-	-	Pembelian	2021			Baik	1	176.407.000,00
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen Semi	-	-			Pembelian	2021		M2	Baik	1
Hard Disk Hard Disk Printer (Peralatan)	Seagate Exos / Hardisk Server Type B Seagate Exos / Hardisk Server Type B	- - -	Besi Besi Plastic/Fiber	Pembelian Pembelian Pembelian	2023 2023 2023			Baik Baik Baik	5 1 1	68.792.250,00 13.757.750,00 8.700.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Personal Komputer)	Epson / Printer	-	Fiber/Plastic Besi	Pembelian Pembelian	2023			Baik Baik Baik Baik Baik	12	49.084.200,00
Router Rak Server Rak	Inkjet+Fotocopy F4	-	Besi besi	Pembelian Pembelian	2023			Baik Baik	2	28.600.000,00
Server Firewall Switch	RB 4011 / Router Type E	-	Plastik/fiber	Pembelian	2023			Baik	29	122.815.000,00
Switch Switch	ABBA RACK /	-	Fiber/Plastic	Pembelian Pembelian	2023			Baik	1	259.000.000,00
Acces Point	Rak Server ONESIA / Rak	-	Fiber/Palstic	Pembelian	2023			Baik	1	2.600.000,00
Acces Point	server 15U SHOPOS /	-	Plastik	Pembelian	2023			Baik Baik Baik Baik	1	7.304.300,00
Acces Point	Firewall tipe A TP-Link / Switch	-	Plastik	Pembelian	2023				14	62.160.000,00
Peralatan Jaringan	Type G	-	Fiber/plastik	Pembelian Pembelian	2023				21	74.483.178,00
lainnya Peralatan	Lynksys / Type D	-	Campuran Besi	Pembelian Pembelian	2023				1	3.546.822,00
Jaringan lainnya	D-Link / Switch Type E	-	Besi Besi		2023				1	3.996.000,00
Peralatan Jaringan	Unifi Apac Pro / Acces Point	-			2023				2	2.664.000,00
lainnya Peralatan	Indor B	-			2023				2	4.595.400,00
Jaringan lainnya	Unifi Apac Pro / Acces Point	-			2023				2	11.766.000,00
	Indor B	-			2023				57	189.759.384,00
	Acces Point Indor D Troughtput 2.4GHZ Speed 300Mb									
	Tool FTTH									
	Ubiquiti / Antena jaringan Type D									
	Ubiquiti / Antena Jaringan									
	Type A Lokal / Tiang FO									
Microphone/Wireless MIC	MICROPHONE	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	3	9.885.000,00
	DJ1 MIC 2									
	shadow black									
	{1TX}									

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Microphone/Wireless MIC	MIC SURE MV7X	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	3	14.040.000,00
Microphone/Boom Stand	SOUNTECH	-	fiber	Pembelian	2024			Baik	3	5.970.000,00
	AKSESORIS									
	Heavyduty									
	probboom arm stand									
Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	BATERAY SONY NP-FZ100	-	ALMINIUM	Pembelian	2024			Baik	2	2.880.000,00
Tripod Camera	DJ1 GIMBAL	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	16.600.000,00
	STABILIZER and									
	MIROLEAS CAMERA									
Tripod Camera	TAKARA HIDRO B18 PRO VIDEO TRIPOD	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	2	7.760.000,00
Lensa Kamera	LENSA KAMERA FE24	-	FIBER, KACA	Pembelian	2024			Baik	1	47.560.000,00
Lensa Kamera	LENSA KAMERA SONY	-	FIBER, KACA	Pembelian	2024			Baik	1	54.600.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Camera Digital	SONY / ALPHA	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	21.500.000,00
	a6400 mirror less									
Camera Digital	KAMERA	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	90.100.000,00
	SONIA7RV									
Lampu Blitz Kamera	FLASH SONI	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	2	12.420.000,00
	HVLF28RM									
	EXTERNAL									
	FLASHFIBER									
Alat Studio Video Lainnya	LIGHTING	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	3	5.970.000,00
	STUDIO GODOX									
	VIDEO									
	SL60WATT									
alat komunikasi telephone lainnya	Apel / Ipad tablet	-	fiber	Pembelian	2024			Baik	2	28.380.000,00
(dst)										
Genset	TSZUMI /	-	Besi/Tembag	Pembelian	2024	8000 WATT		Baik	1	52.400.000,00
	TDO1500S-3		a							
Tripod	TRIPOD EXCELL	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	3	6.300.000,00
	POWER BOOM									
	STAND 2in 1									
	boom stand									

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Adaptor	CHARGER	-	TEMBAGA	Pembelian	2024			Baik	2	1.520.000,00
	BATERAI 8									
	SLOTAAAA									
	NI-MH									
Personal Computer	LED MONITOR	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	2.750.000,00
	TYPE F									
Uninterrupted Power Supply (UPS)	UPS TYPE A	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	46.620.000,00
P.C Unit	ASUZ /	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	36.650.000,00
	ROGDESKTOPG1									
	3CH7F1153607W									
	SO+2MONITOR									
Lap Top	ASUS / VIVO	-	FIBER	Pembelian	2024	14"		Baik	1	12.300.000,00
	BOOK									
Lap Top	ASUZ / TUF	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	20.538.000,00
	GAMING									
	FX507ZU4									
Lap Top	ASUZ / ROG	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	2	84.556.000,00
	Zephyrus									
	G14GA402XV-R9									
	46G7G-0									
Lap Top	asus	-	fiber	Pembelian	2024			Baik	2	38.000.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	SCANNER POTABLE BROTHER DS640	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	3.100.000,00
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	SCANNER EPSON DS 410	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	11.390.000,00
Monitor	SAMSUNG / QA75Q60AAKQL ED4KUHD	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	28.930.000,00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L5290 / PRINTER INJEKT+FOTOC OPY F4 TYPE B	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	2	13.600.000,00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / ECO TANK L3250	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	3.600.000,00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / ECO TANK L3250	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	3.527.000,00
External/ Hardisk	Portable HDD HPE 2.4TB SAS 12G /	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	17.815.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
External/ Hardisk	Portable	Enterprise 10K	FIBER	Pembelian	2024			Baik	33	587.895.000,00
		SFF (2.5in) SC								
		872477-B21								
		HDD HPE 2.4TB								
		SAS 12G /								
		Enterprise 10K								
External/ Hardisk	Portable	SFF (2.5in) SC	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	28.300.000,00
		872477-B21								
		DORA TYPE A,								
Peralatan Komputer lainnya	Personal	HD EXTERNAL,	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	6.493.000,00
		HADA SATA 3								
Peralatan Komputer lainnya	Personal	MEMORY HPE	FIBER	Pembelian	2024			Baik	28	181.804.000,00
		32GB								
Server		MEMORY HPE	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	107.990.000,00
		32GB								
Server		SERVER HPE DL	ALMUNIU/F	Pembelian	2024			Baik	5	539.950.000,00
		300								
Router		SERVER HPE DL	ALMUNIU/F	Pembelian	2024			Baik	1	57.330.000,00
		300								
Router		MIKROBITSV3	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	57.330.000,00

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wireless Access Point	HOLLYLAND	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	9.702.000,00
KVM Keyboard Video Monitor	MARS 400S PRO	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	55.400.000,00
	ATEN CL5708M	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	7.800.000,00
Peralatan Komputer lainnya	8-PORT SSD EXTENAL	-	FIBER	Pembelian	2024			Baik	1	
Kursi Lipat	Chitose	-	Besi / Busa	Pembelian	2006			Baik		
Kursi Besi/Metal	Polaris	-	Besi / Busa	Pembelian	2007			Baik		
Kursi Putar Modulation Monitor Speaker Kabaret	hidrolik mini / kursi putar -	- -	Plastik fiber	Pembelian Pembelian	2012 2012			Rusak Berat Baik		
Kursi Biasa Kursi Biasa Kursi Biasa	- Chitose -	- - -	Besi Besi Besi	Pembelian Pembelian Pembelian	2013 2013 2013			Baik Baik Baik		
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Font Line Front Line	- -	Besi Besi	Pembelian Pembelian	2014 2014			Baik Baik		
peralatan studio audio lainnya (dst)	-	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik		

SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Uninterruptible Power Supply (UPS) Router Wireless Access Point Peralatan Jaringan lainnya Peralatan Jaringan lainnya Peralatan Jaringan lainnya Peralatan Jaringan lainnya	- Switch Gigabit 8 port Ubiquity ETH-SP Ethernet Surge Protector Anti peti WOEDPRESS EVENT PLUGIN CALENDER PLUGIN REGULER LICENSE Box panel listrik topi / outdoor -	- - - - - -	- Besi Plastik - Besi Besi		Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian	2020 2020 2020 2020 2020 2020			Baik Baik Baik Baik Baik Baik	
Alat Studio Lainnya	Bingkai Foto	-	fiber		Pembelian	2021			Baik	
Bracket Standing Peralatan	lokal / Bracket TV	-	Besi		Pembelian	2022			Baik	
Tang Buaya Tang Buaya Alat Studio Video Lainnya	TANG BUAYA TANG BUAYA EZZMODE PAYUNG OCTAGONALsoft box Flash 80cm	- - -	BESI BESI FIBER, BESI		Pembelian Pembelian Pembelian	2024 2024 2024			Baik Baik Baik	

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian pada pelaksanaan kinerja sebelumnya diperoleh melalui beberapa indikator yang akan disajikan yang menggambarkan berdasarkan hasil rilis Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

2.3.1 Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Sulawesi Barat

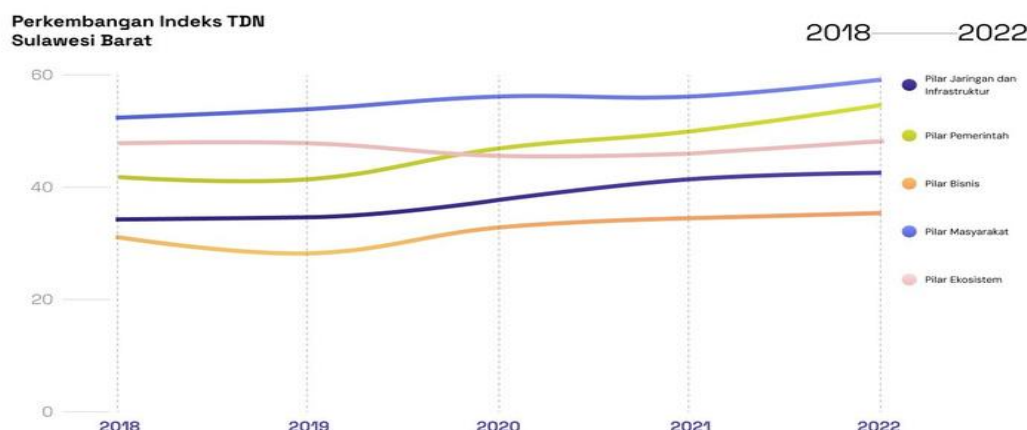
Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) disusun untuk memenuhi kebutuhan pengukuran perkembangan transformasi digital di tingkat nasional dan daerah. Indeks TDN merupakan konsep holistik yang menyajikan data dari berbagai aspek perkembangan digital, antara lain infrastruktur, pemerintah, ekonomi dan masyarakat digital.

Kerangka Indeks TDN merupakan kerangka yang sesuai dengan strategi pencapaian Visi Indonesia Digital 2045, yang memiliki strategi utama selaras dengan pilar-pilar yang ada di Indeks TDN. Indeks TDN mengukur proses transformasi digital pada 4 pilar, melalui 3 tahap, yaitu fondasi, adopsi dan akselerasi. Masing-masing tahap menggambarkan tingkat kesiapan dan kinerja dalam menjalankan transformasi digital, di mana tahap fondasi berfokus pada pembangunan dasar infrastruktur dan kebijakan yang mendukung transformasi digital; tahap adopsi berfokus pada adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh berbagai pihak; dan tahap akselerasi menyoroti upaya untuk mempercepat transformasi digital melalui inovasi dan pengembangan teknologi canggih.

Keempat pilar dan tiga tahap tersebut dirinci ke dalam 15 domain yang menggambarkan situasi kemajuan transformasi digital pada tiap pilar. Pilar jaringan dan infrastruktur merujuk pada komponen konektivitas mendukung implementasi teknologi digital, mencakup aspek jaringan yang andal, pemanfaatan dan inklusivitas akses. Pilar pemerintah merujuk pada komponen yang berkaitan dengan peran dan Tindakan pemerintah dalam mendorong dan memfasilitasi penggunaan teknologi digital untuk efektivitas pelayanan publik. Pilar ekonomi merujuk pada aspek-aspek yang terkait dengan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat dan mengubah sektor ekonomi secara keseluruhan. Pilar masyarakat digital merujuk pada pemberdayaan masyarakat untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi

digital dalam aktivitas sehari-hari. Berikut merupakan capaian Indeks Tranformasi Digital Nasional Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2022 berdasarkan pilar jaringan dan infrastruktur, pilar pemerintahan, pilar bisnis, pilar masyarakat dan ekosistem.

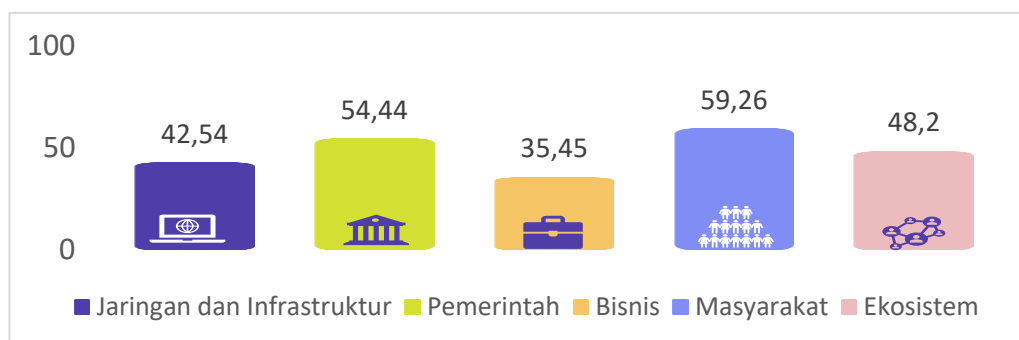
Gambar 2.1 Perkembangan Indeks Transformasi Digital Nasional Sulawesi Barat



Sumber: Komdigi,2022

Provinsi Sulawesi Barat telah mencatat perkembangan kondisi transformasi digital sejak tahun 2018, tercermin melalui peningkatan skor Indeks TDN dari semula 39,99 pada tahun 2018 menjadi 46,86 pada tahun 2022. Hasil ini mengindikasikan adanya upaya serius dari pemerintah daerah dan stakeholders lainnya, terutama untuk Pilar Masyarakat, Jaringan dan Infrastruktur, serta Pemerintah dalam memperbaiki kondisi transformasi digital di Provinsi Sulawesi Barat. Berikut merupakan capaian skor pilar Indeks Transformasi Digital Tahun 2022.

Gambar 2.2 Skor Pilar Sulawesi Barat Tahun 2022



Sumber: Komdigi,2022

Jika dilihat berdasarkan pilar, Pilar Masyarakat memperoleh skor cukup baik dibandingkan pilar-pilar lainnya, yaitu sebesar 59,26 di tahun 2022 yang menempatkan provinsi ini pada Klasifikasi B (Baik). Meskipun demikian, terlihat bahwa kemampuan dasar masyarakat di provinsi ini masih di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Sulawesi Barat perlu terus berupaya meningkatkan kapasitas keterampilan dasar masyarakat untuk membentuk fondasi SDM yang lebih kuat.

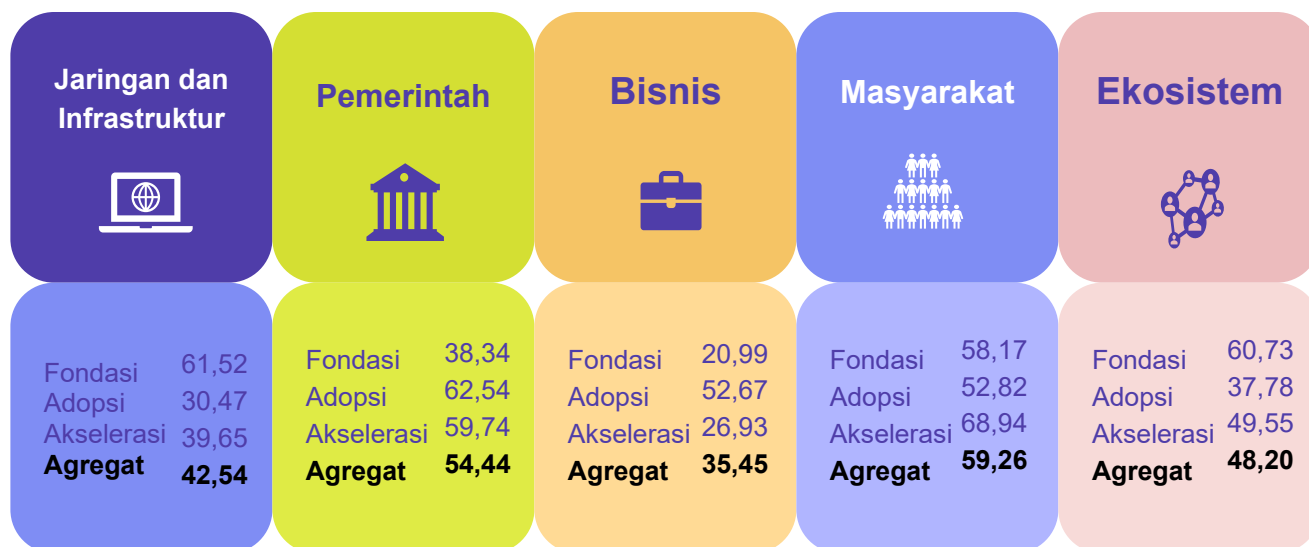
Selain itu, perlu juga diringi oleh peningkatan keterampilan digital melalui *upskilling* dan *reskilling* yang sesuai kebutuhan industri agar terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di provinsi tersebut. Selain itu, pilar lain yang juga memiliki kinerja cukup baik adalah Pilar Pemerintah dengan skor 54,44 yang masuk ke dalam Klasifikasi B (Baik). Namun, untuk memperoleh hasil yang optimal dari transformasi digital di Pilar Pemerintah, perlu dilakukan peningkatan yang signifikan terutama pada aspek *online service index* dan *index* agar pelaksanaan layanan pemerintahan dapat lebih efisien dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Lebih lanjut, layanan pemerintahan *online* juga perlu diperbarui secara berkala dan dilakukan pemeliharaan rutin agar optimal dalam pelaksanaannya.

Pilar Jaringan dan Infrastruktur merupakan pilar yang memerlukan upaya dan perhatian lebih lanjut mengingat saat ini skor tersebut masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari data Komdigi tahun 2022 bahwa cakupan 4G di Provinsi Sulawesi Barat hanya sebesar 39,84%. Kemudian, agar cakupan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, kepemilikan tablet dan komputer perlu ditingkatkan untuk mendorong adopsi teknologi digital dan produktivitas di berbagai sektor.

Di sisi Pilar Bisnis. Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam Klasifikasi C dengan skor sebesar 35,45. Terlihat dari pengeluaran untuk riset dan pengembangan (R&D) yang masih rendah dan perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, perlu adanya langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mendukung kegiatan R&D, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Selain itu, diperlukan dorongan dan insentif bagi pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi baru

agar produktivitas dapat lebih ditingkatkan. Berikut merupakan rincian nilai fondasi, adopsi, akselerasi dan agregat setiap pilar.

Gambar 2.3 Skor Agregat Berdasarkan 5 Pilar TDN Sulawesi Barat 2022



2.3.2 Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah pendekatan relevan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik serta administrasi pemerintahan. Di Indonesia, basis penerapan SPBE diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang juga menempatkannya sebagai komponen penting dalam reformasi birokrasi. Secara komprehensif, inisiatif SPBE tentunya bersinergi dengan kebijakan transformasi digital lainnya yaitu Satu Data Indonesia (SDI) untuk mewujudkan digitalisasi pemerintahan yang didorong oleh data. Dengan penerapan SPBE yang terpadu dan menyeluruh, diharapkan terciptanya birokrasi yang lebih adaptif, transparan, dan inovatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Struktur penilaian 55ingkat kematangan penerapan SPBE terdiri atas:

- Domain, merupakan area penerapan SPBE yang dinilai;
- Aspek, merupakan area spesifik penerapan SPBE yang dinilai;
- Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE yang dinilai.

Setiap domain terdiri dari satu atau beberapa aspek dan setiap aspek terdiri dari beberapa 56 tingkat 56 r. Keterangan lebih lanjut mengenai domain, aspek dan indikator dalam struktur penilaian tingkat kematangan SPBE dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Bobot Penilaian Indikator Indeks SPBE

Domain	Aspek	Nomor Indikator	Bobot Indikator (%)
Dimensi 1 (Kebijakan Internal SPBE)	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indikator 1-10	1,30
Dimensi 2 (Tata Kelola SPBE)	Perencanaan Strategis SPBE	Indikator 11-14	2,50
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indikator 15-18	2,50
	Penyelenggara SPBE	Indikator 19-20	2,50
Dimensi 3 (Manajemen SPBE)	Penerapan Manajemen SPBE	Indikator 21-28	1,50
	Pelaksanaan Audit TIK	Indikator 29-31	1,50
Dimensi 4 (Layanan SPBE)	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indikator 32-41	2,75
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indikator 42-47	3,50

Sumber: Kemenpan RB, 2024

Indeks 56 tingkat kematangan SPBE dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan setiap indikator. Jenis-jenis nilai indeks mencakup beberapa kriteria, antara lain:

- a. Nilai Indeks Aspek. Indeks aspek merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek.

- b. Nilai Indeks Domain. Indeks domain merepresentasikan Tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu domain tertentu.
- c. Nilai Indeks SPBE. Indeks SPBE merepresentasikan kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Penilaian indeks SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sesuai pada Tabel berikut.

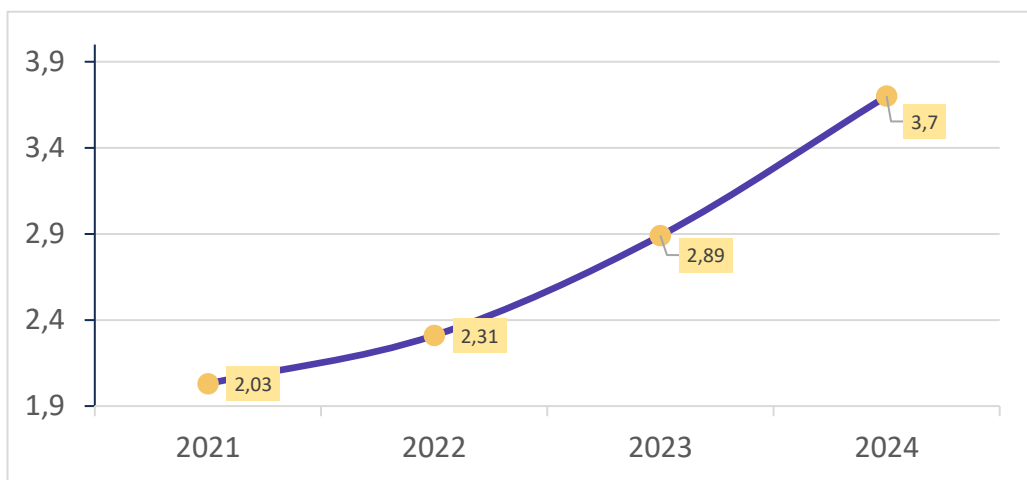
Tabel 2.5 Predikat Indikator Indeks SPBE

Interval Nilai Indeks	Predikat
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
<1,8	Kurang

Sumber: Kemenpan RB, 2024

Dari hasil Evaluasi SPBE 2024, dapat disimpulkan bahwa penerapan SPBE di Provinsi Sulawesi Barat telah menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, Indeks Maturitas SPBE mencapai 3,70 (kategori Sangat Baik), melebihi target yang telah ditetapkan dan menandai pencapaian penting karena untuk pertama kalinya indeks SPBE Sulawesi Barat berada pada kategori sangat baik. Berikut merupakan capaian Indeks SPBE Sulawesi Barat Tahun 2021-2024

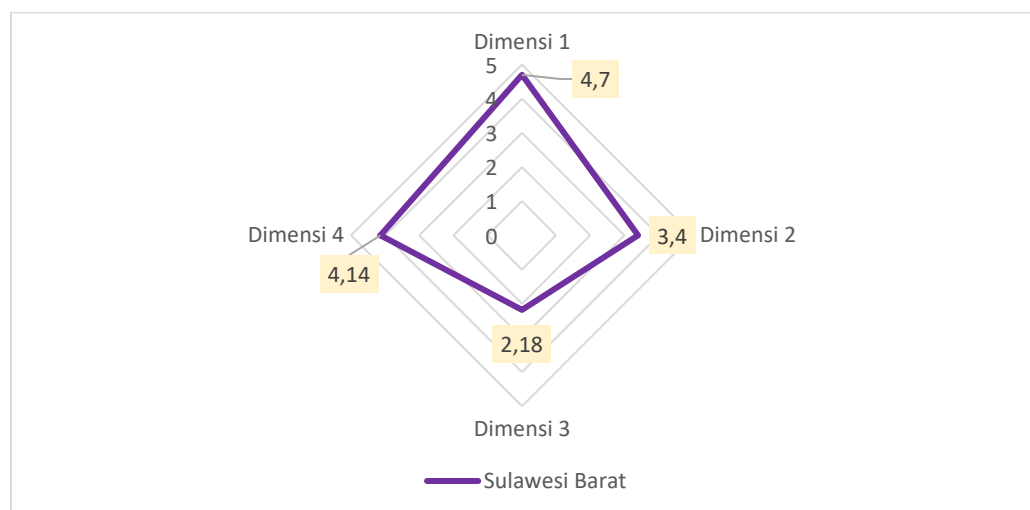
Gambar 2.4 Hasil Penilaian Indeks SPBE



Sumber: Kemenpan RB, 2024

Domain Kebijakan Internal SPBE dan Layanan dan Kebijakan Internal SPBE mencatat hasil yang mengungguli domain lainnya dengan nilai rata-rata 4,7 dan 4,14 yang masing-masing masuk dalam kategori Sangat Baik. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Sulawesi Barat telah berhasil mengintegrasikan layanan administrasi dan layanan publik secara digital, serta mengimplementasikan kebijakan internal yang mendukung transformasi digital. Namun, nilai pada Domain Manajemen dengan rerata skor indeks kematangan 2,18 dapat dikatakan masih belum bisa mengejar performa ketiga domain lainnya. Hal ini menandakan bahwa meski fondasi digital telah kuat, aspek pengelolaan terutama dalam hal manajemen risiko, audit TIK, dan pemanfaatan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Berikut merupakan gambaran capaian dimensi Indeks SPBE Sulawesi Barat Tahun 2024.

Gambar 2.5 Hasil Penilaian Indeks SPBE per Dimensi Tahun 2024



Sumber: Kemenpan RB, 2024

2.3.3 Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator penting dalam sebuah negara demokrasi. Demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi dan partisipasi lahir dari adanya keterbukaan informasi. Negara yang tanpa keterbukaan informasi cenderung tertutup dan membatasi diri dari partisipasi masyarakat yang berimbas pada mentalitas yang berwatak korup dan manipulatif. Sudah dalam keadaan demikian, kultur dan mentalitas tersebut bersifat hegemonik. Itulah mengapa, dari waktu ke waktu, seakan tak lekang oleh gilasan zaman, korupsi dan manipulasi digerakkan oleh para pengelola

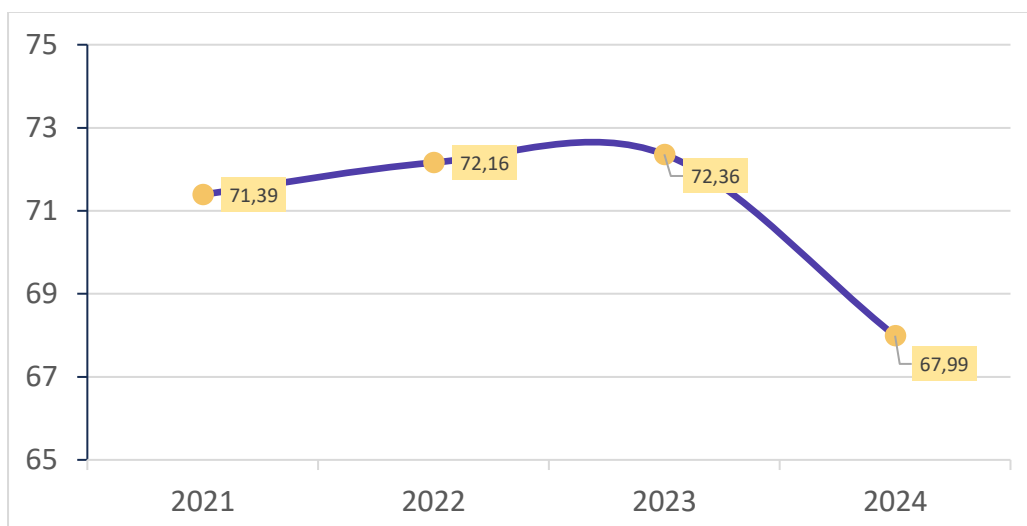
negara yang mendukung ketertutupan untuk tujuan pokok memaksakan kehendak yang bersifat subyektif, sehingga benar-benar dirasakan sebagai beban oleh rakyat.

Keberadaan undang-undang keterbukaan informasi publik diharapkan bukan hanya sebagai barang legal formal. Tapi bisa menjadi bangunan yang kokoh untuk menjadi rumah atas pemenuhan hak akses informasi, kebebasan mendapat informasi, perlindungan, hingga upaya penyelesaian sengketa informasi. Terdapat 20 indikator penghitung IKIP yakni sebagai berikut:

- a. Kebebasan mencari informasi tanpa takut;
- b. Akses dan diseminasi informasi;
- c. Ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan terbaru;
- d. Partisipasi 59ublic;
- e. Literasi publik atas hak keterbukaan informasi;
- f. Proporsionalitas pembatasan keterbukaan;
- g. Biaya ringan mendapatkan informasi;
- h. Tata Kelola informasi 59ublic;
- i. Dukungan anggaran pengelolaan informasi;
- j. Kemanfaatan informasi bagi 59ublic;
- k. Keberagaman kepemimpinan media;
- l. Keberpihakan media pada keterbukaan informasi;
- m. Transparansi;
- n. Jaminan hukum atas akses informasi;
- o. Kebebasan menyebarluaskan informasi;
- p. Perlindungan bagi pemohon informasi;
- q. Kebebasan dari penyalahgunaan informasi;
- r. Perlindungan hukum bagi *whistleblower*;
- s. Kepatuhan menjalankan UU KIP;
- t. Ketersediaan penyelesaian sengketa informasi.

Berikut merupakan hasil perhitungan Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.

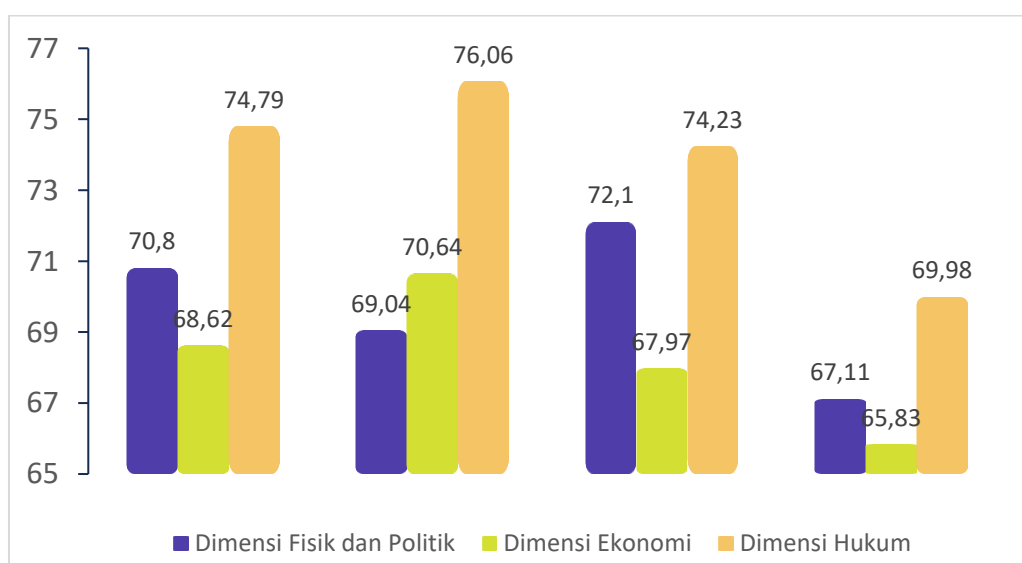
Gambar 2.6 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Sulawesi Barat Tahun 2021- 2024



Sumber: Komisi Informasi, 2024

Capaian Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan progres hingga mengalami penurunan pada tahun 2024, penurunan tersebut kemudian akan dijabarkan dalam hasil perhitungan Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 yang dibagi dalam 3 dimensi lingkungan yakni lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum. Berikut merupakan perhitungan Indeks Keterbukaan Informasi berdasarkan dimensi.

Gambar 2.7 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Per Dimensi Sulawesi Barat Tahun 2021- 2024



Sumber: Komisi Informasi, 2024

Berdasarkan capaian IKIP per dimensi, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan dimensi fisik dan politik, dimensi ekonomi dan dimensi hukum pada tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Barat, hal ini menunjukkan penurunan kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan akses informasi publik yang dapat dipengaruhi oleh infrastruktur, kebijakan lokal serta partisipasi masyarakat dalam proses transparansi informasi. Dimensi ekonomi merupakan dimensi terendah dalam capaian Sulawesi Barat hal ini menunjukkan masih perlu ada perbaikan dalam transparansi ekonomi, khususnya dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran. Dimensi fisik dan politik yang mengalami penurunan dipengaruhi oleh komitmen pemerintah dalam mendukung keterbukaan informasi misalnya dalam hal tata Kelola keterbukaan informasi dan dukungan anggaran. Penurunan nilai dimensi hukum dipengaruhi penegakan peraturan gubernur terkait keterbukaan informasi publik bahkan dapat diturunkan sampai peraturan desa.

2.3.4 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik harus dilaksanakan dengan baik oleh setiap Kementerian, Lembaga Non-kementerian, dan pemerintah daerah dengan memanfaatkan Input berupa sumberdaya yang dimiliki dan dengan melaksanakan proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan. Indeks PIKP merupakan suatu indikator gabungan (*composite indicator*) yang mengukur aspek-aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yaitu input, proses, output dan outcome. Indeks PIKP dikembangkan untuk menyediakan suatu alat ukur yang obyektif dalam memonitor dan mengevaluasi serta membandingkan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Non-kementerian dan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.6 Dimensi dan Variabel Perhitungan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)

Dimensi	Variabel	Jumlah Indikator	Bobot
Input	1. Anggaran	15	25%

Dimensi	Variabel	Jumlah Indikator	Bobot
	2. Bahan Informasi 3. Sarana dan Prasarana 4. Media dan Komunikasi		
Proses	5. Pengumpulan Data 6. Perencanaan 7. Pelaksanaan 8. Monitoring dan Evaluasi	20	25%
Output	9. Penerima Informasi 10. Penilaian Publik terhadap teknis pelayanan informasi publik 11. Penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik	7	25%
Outcome	12. Pemenuhan Hak untuk Mengetahui 13. Pemerataan Informasi	5	25%

Dimensi	Variabel	Jumlah Indikator	Bobot
	14. Partisipasi Publik		

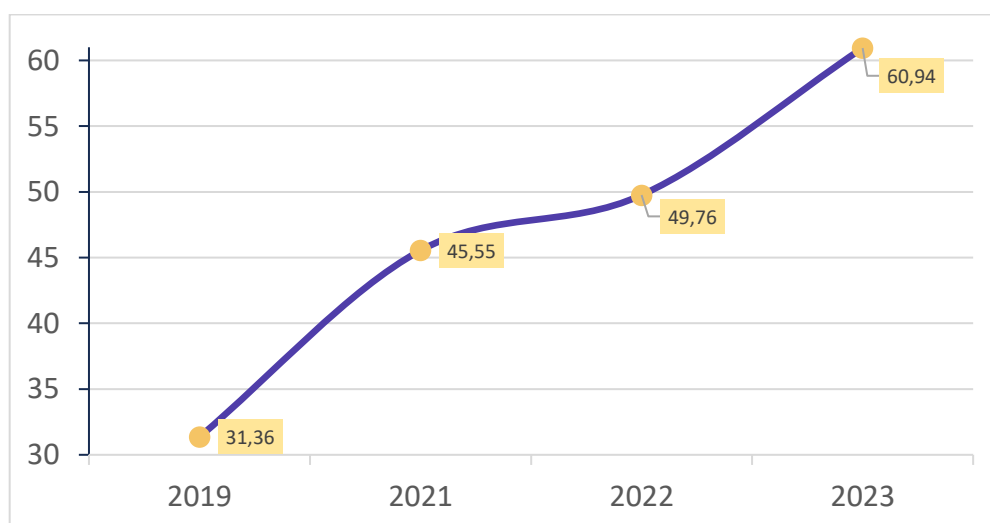
Sumber: Komdigi, 2023

Capaian skor untuk setiap variabel ditentukan berdasarkan rata-rata skor yang dicapai instansi. Skor tersebut berkisar dari angka 1 – 100. Untuk tujuan evaluasi dan pembinaan, skor atau nilai total seluruh dimensi dalam Indeks PIKP 2019 dibagi menjadi lima kategori, yaitu:

- Sangat Baik (skor >80),
- Baik (skor= 71-80)
- Sedang (skor = 61-70)
- Buruk (skor=51-60)
- Sangat Buruk (skor <50)

Capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Sulawesi Barat dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023 peningkatan capaian sangat signifikan mencapai 60,94 meskipun masih termasuk pada kategori buruk. Untuk lebih jelasnya disajikan data capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Sulawesi Barat dari tahun 2019-2023 sebagai berikut.

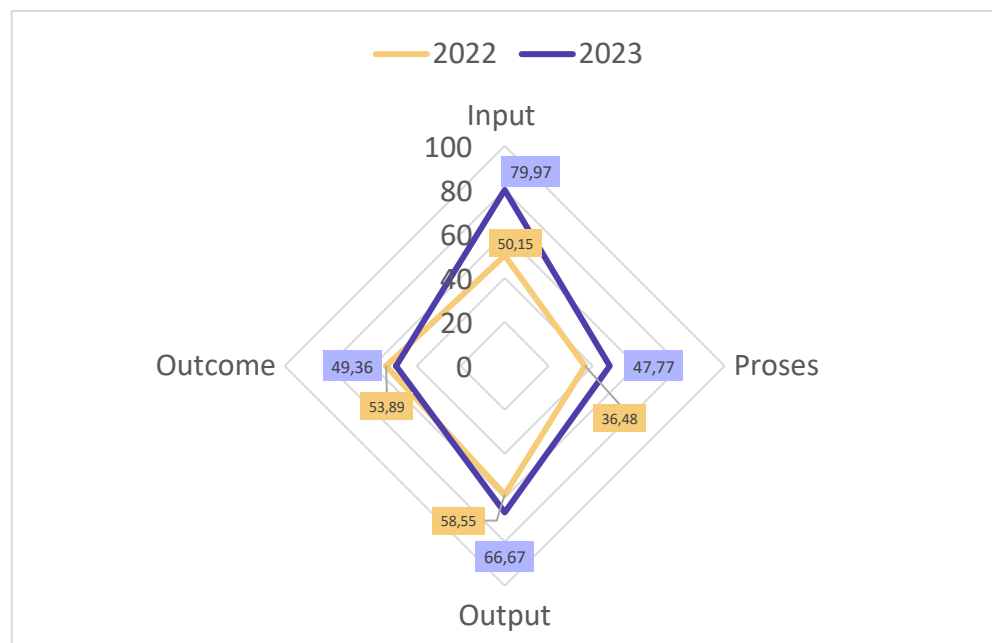
Gambar 2.8 Capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Sulawesi Barat Tahun 2019-2023



Sumber: Komdigi, 2023

Untuk menilai kelemahan capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Sulawesi Barat kemudian ditampilkan rincian perolehan setiap dimensi, ditemukan bahwa capaian dimensi terendah adalah Dimensi Proses dan Dimensi Outcome dengan nilai berturut-turut 47,77 dan 49,36.

Gambar 2.9 Capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Per Dimensi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023



Sumber: Komdigi, 2023

Variabel pengukur dimensi proses yaitu pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Di Provinsi Sulawesi Barat variable terendahnya adalah pengumpulan data, perencanaan dan pelaksanaan yang termasuk dalam kategori sangat buruk. Aspek pengumpulan merupakan aktivitas yang sangat penting dan mutlak dilakukan mulai dari pengumpulan data melibatkan instansi eksternal, melalui penyerapan aspirasi publik ataupun dengan menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain. Tahap kedua dalam siklus atau proses PIKP adalah perencanaan program/kegiatan. Pada tahap ini, pengukuran variabel difokuskan pada enam indikator, yaitu jumlah pelaksanaan rapat koordinasi internal, jumlah rapat koordinasi dengan pihak eksternal, ketersediaan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan dan perencanaan kegiatan

komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan lainnya. Pada tahap perencanaan ini juga mendapatkan nilai yang rendah, sehingga ada ruang perbaikan untuk tahun-tahun kedepannya.

Pada dimensi outcome, mencakup pemenuhan pemahaman public tentang hak untuk tahun (*Right To Know*), partisipasi public dalam proses-proses kebijakan pemerintah, dampak kepercayaan public terhadap pemerintah dan pemerataan informasi. Tingginya pemanfaatan hak untuk tahu tidak selalu dibarengi oleh tingkat partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah. Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami, hak tersebut dapat digunakan untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah agar berpihak pada masyarakatnya. Masyarakat seperti ini memilih alternatif-alternatif lain dalam ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan pemerintah dan pembangunan. Kanal-kanal lain dalam proses ini yang disediakan pemerintah, antara lain kanal aduan masyarakat (SP4N-Lapor), lembaga-lembaga aduan masyarakat, hingga layanan informasi publik oleh PPID.

2.3.5 Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data 65 statistik dan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral dengan cara mengukur 65 statistik kematangan (*maturity level*) dari penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses yang digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen penyelenggaraan Statistik Sektoral. Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum. Kriteria tingkat kematangan kapabilitas proses dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Kriteria Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Level	Tingkat	Kriteria
1	Rintisan	Proses penyelenggaraan Statistik Sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
2	Terkelola	Proses penyelenggaraan Statistik Sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri. Jika standar yang digunakan juga diterapkan pada sebagian unit kerja lain dalam satu organisasi yang sama, maka masih berada di level ini.
3	Terdefinisi	Proses penyelenggaraan Statistik Sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
4	Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan Statistik Sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses.
5	Optimum	Proses penyelenggaraan Statistik Sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Sumber: BPS, 2022

Penilaian pada pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a. domain, merupakan area pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai;
- b. aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai; dan
- c. indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai.

Sebuah domain terdiri dari beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator. Adapun struktur penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat dilihat pada Tabel 2.8 dalam bentuk hierarki.

Tabel 2.8 Hierarki Domain, Aspek, dan Indikator Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Nama Domain	Nama Aspek	Nama Indikator
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)
	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik
	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data
	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi
Kualitas Data	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data Terhadap Pengguna
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data

Nama Domain	Nama Aspek	Nama Indikator
	Aktualitas dan Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data
	Keterbandingan dan Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data
		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik
	Proses Bisnis Statistik	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik
		Tingkat Kematangan Desain Statistik
		Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen
	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data
	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data
		Tingkat Kematangan Analisis Data
	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data
Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Transparansi Informasi Statistik Kematangan Penjaminan
		Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas

Nama Domain	Nama Aspek	Nama Indikator
		terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi
		Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data
		Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data
	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data
	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring,

Nama Domain	Nama Aspek	Nama Indikator
		Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan
		Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik
	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik
	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik
		Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan Big Data

Sumber: BPS, 2022

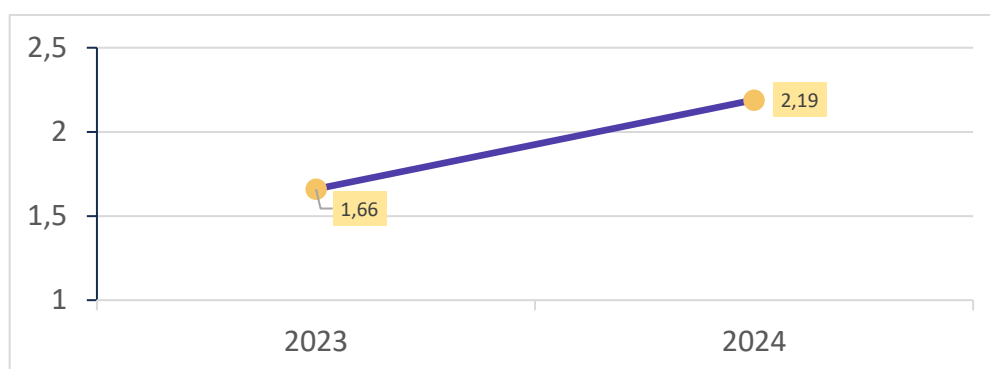
Nilai Indeks diberikan predikat yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan pengelompokan berdasarkan kategori seperti tertera pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Predikat Penilaian Tingkat Kematangan

Nilai Indeks	Predikat
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
<1,8	Kurang

Sumber: BPS, 2022

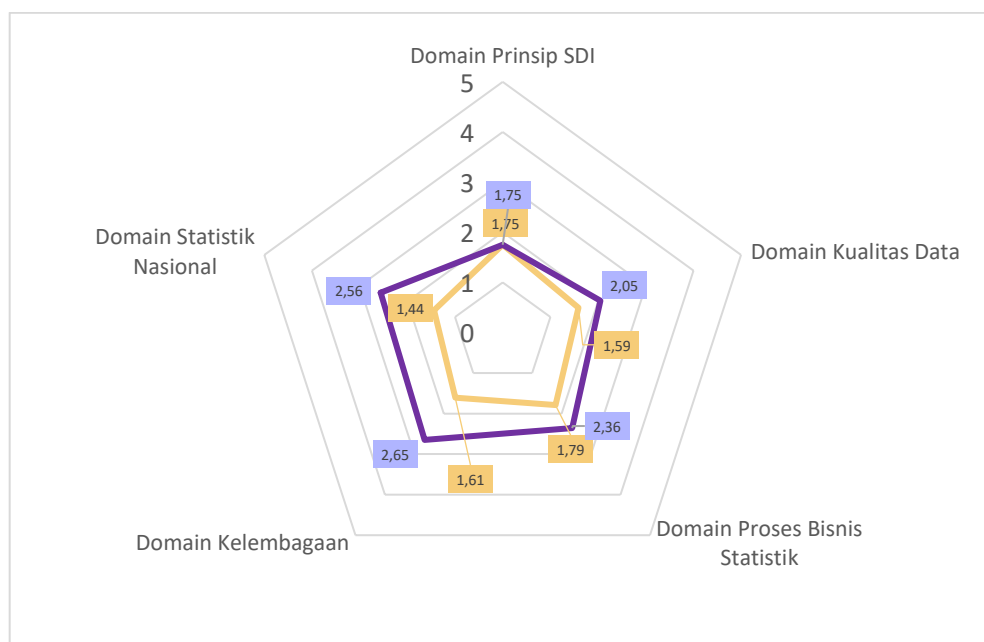
Gambar 2. 9 Capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Sulawesi Barat Tahun 2023-2024



Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 adalah 1,66 dengan predikat Kurang sedangkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 adalah 2,19 dengan predikat Cukup. Untuk melihat komponen yang masih rendah dalam penilaian IPS Sulawesi Barat ditampilkan capaian nilai per Domain.

Gambar 2.10 Capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Per Domain Sulawesi Barat Tahun 2023



Sumber: Komdigi, 2023

Domain terendah pada Indeks Pembangunan Statistik (IPS) pada tahun 2023 ialah domain 72tatistic nasional berikut merupakan kekurangan pada domain tersebut penggunaan data 72tatistic dasar untuk perencanaan, monitoring evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Sosialisasi dan literasi data statistik kepada publik belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Pada Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah memberitahukan rancangan kegiatan statistik ke BPS. Rancangan kegiatan statistik yang diajukan telah mendapatkan rekomendasi LAYAK untuk kegiatan statistik Kompilasi Data Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Provinsi Sulawesi (nomor rekomendasi K-22.7600.013) dan Kompilasi Data Kesehatan Ibu dan Anak Provinsi Sulawesi Barat (nomor rekomendasi K- 22.7600.012). Namun, kedua kegiatan tersebut tidak didukung oleh kebijakan/kaidah yang baku untuk seluruh produsen data. Pada Aspek Penguatan Sistem Statistik Nasional Berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum menyusun dan menetapkan rencana pembangunan statistik. Penyebarluasan data belum dilakukan oleh seluruh produsen data, dan pemanfaatan big data dalam kegiatan statistik belum dilakukan.

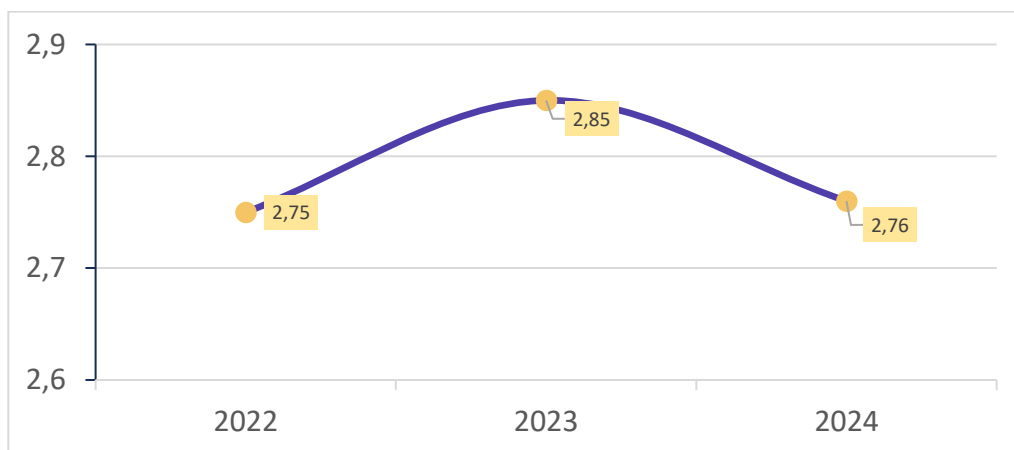
Pada tahun 2024 domain terendah adalah domain prinsip SDI yang memiliki kekurangan pada Penerapan Aspek Metadata Statistik berpredikat cukup, sedangkan penerapan Aspek Standar Data Statistik, dan Interoperabilitas Data masih berada pada predikat kurang. Penerapan Aspek Metadata Statistik sudah dilaksanakan oleh produsen data namun belum menyeluruh. Penerapan Aspek Standar Data Statistik dan Interoperabilitas Data belum dilaksanakan oleh produsen data dan belum ditemukan bukti dukung yang relevan yang menunjukkan penerapan aspek-aspek tersebut.

2.3 6 Cyber Security Maturity (CSM)

Cyber Security Maturity (CSM) yang merupakan alat bantu untuk mengukur kematangan keamanan siber organisasi. Diharapkan organisasi dapat melakukan peningkatan pengelolaan siber serta memastikan pengelolaan berjalan optimal dan berfungsi secara menyeluruh. BSSN mengajukan berbagai pertanyaan dari lima aspek yang diukur mulai dari aspek tata

kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, dan respon. *Cyber Security Maturity (CSM)* mendapatkan nilai 2,76 dengan level kematangan 2 pada tahun 2024, menurun 0,09 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Berikut merupakan capaian *Cyber Security Maturity (CSM)* Tahun 2022-2024.

Gambar 2.11 Capaian Cyber Security Maturity (CSM) Sulawesi Barat Tahun 2022-2024



Sumber: Badan Siber dan Sandi Negara, 2024

2.3.7 Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

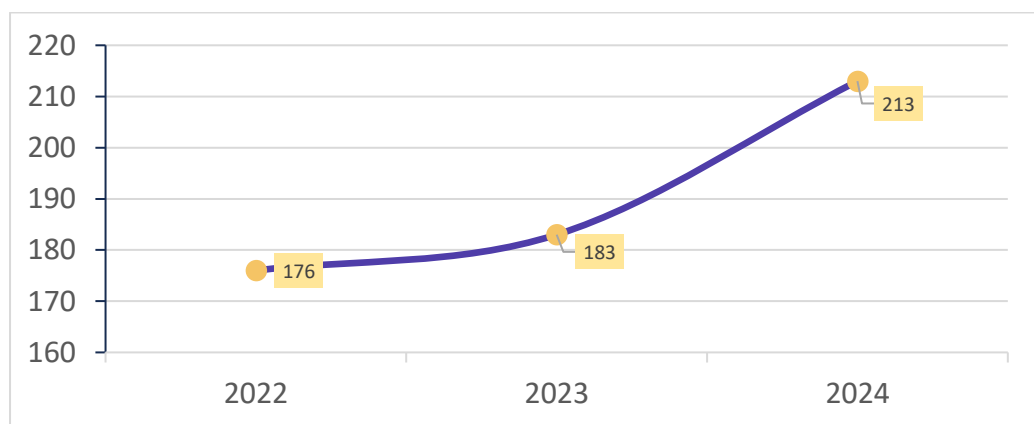
Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di beberapa area berikut:

- Kategori Sistem Elektronik yang digunakan;
- Tata Kelola Keamanan Informasi;
- Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi;
- Kerangka Kerja Keamanan Informasi;
- Pengelolaan Aset Informasi;
- Teknologi dan Keamanan Informasi
- Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan,

Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (Cloud Service) dan Perlindungan Data Pribadi.

Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi. Berikut merupakan capaian hasil perhitungan Indeks KAMI di Provinsi Sulawesi Barat.

Gambar 2.12 Indeks Keamanan Informasi Sulawesi Barat Tahun 2022- 2024



Sumber: Badan Siber dan Sandi Negara, 2024

Hasil Indeks KAMI Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan peningkatan dari Tahun 2022–2024, namun peningkatan yang terjadi tergolong sangat lambat. Nilai 213 masih sangat jauh dari nilai yang diharapkan, mengingat standar maksimal Indeks KAMI adalah 645 yang berarti capaian Sulawesi Barat Tahun 2024. Selain itu, akan terdapat perubahan kompilasi perhitungan Indeks KAMI. Secara detail perubahan-perubahan pada SNI ISO/IEC 27001:2022 pada poin *annex* atau lampiran yang dilakukan meliputi Restrukturisasi Kategori, 11 kontrol baru, serta pembaruan pada pengendalian. Dengan adanya update pada SNI ISO/IEC 27001:2022, telah dilakukan revisi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dan dilakukan update dari Indeks KAMI versi 4.2 menjadi Indeks KAMI versi 5.0, dengan penambahan sesuai kontrol baru pada SNI ISO/IEC 27001:2022 sebagai berikut:

Tabel 2.10 Indeks Keamanan Informasi Sulawesi Barat Tahun 2022- 2024

Kontrol Baru pada SNI ISO/IEC	Penambahan pada Indeks KAMI
Threat intelligence	Aspek Kerangka Kerja
Information security for cloud services	Aspek Pengelolaan Aset
ICT readiness for business continuity	Aspek kerangka kerja
Physical security monitoring	Aspek teknologi
Configuration management	Aspek teknologi
Information deletion	Aspek Pengelolaan Aset
Data masking	Aspek Pengelolaan Aset
Data leakage prevention	Aspek teknologi
Monitoring activities	Aspek teknologi
Web filtering	Aspek teknologi
Secure coding	Aspek teknologi

2.4 Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah 5 Tahun Terakhir

Gambaran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat lima tahun sebelumnya diperoleh dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2017-2022, Perubahan Rencana Strategis Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis 2023-2026 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel ____.

Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat tercapai sesuai dengan target. Faktor-faktor yang mendukung ketercapaian kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulawesi Barat selama periode 2019 – 2024 adalah:

- Sumber Daya Manusia yang berkompeten;
- Pendidikan dan Pelatihan pegawai;
- Sarana dan Prasarana;
- Budaya Kerja;
- Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi;
- Kerjasama dengan pihak luar (pakar dan akademisi) dalam Upaya *transfer knowledge*;

- g. Koordinasi yang baik dengan instansi pusat maupun daerah serta stakeholder terkait.

Adapun beberapa hal eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu tersebut yaitu:

- a. Pandemi Covid

Dampak dari pandemi Covid tahun 2019–2020 mempengaruhi kondisi sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Barat bahkan Nasional dan Dunia. Hal tersebut juga mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat selaku Perangkat Daerah karena prioritas pembangunan lebih difokuskan secara bertahap yaitu prioritas pada masa pandemi dan pasca pandemi. Terkait Kebijakan *refocusing* yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 dan 2021 menuntut untuk tetap mengoptimalkan anggaran yang ada tetapi capaian – capaian indikator kinerja tetap terpenuhi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada;

- b. Masih terdapat sejumlah daerah/desa di Provinsi Sulawesi Barat yang berkategori *blank spot area*, sehingga dalam penyediaan pelayanan publik berbasis digital masih sulit dilakukan pada area tertentu dan Literasi digital sebagian masyarakat masih lemah.

- c. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mempengaruhi Nomenklatur Program dan Indikator Kinerja, Nomenklatur Kegiatan dan Sub kegiatan, meskipun begitu perubahan nomenklatur tersebut tidak mempengaruhi indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra. Terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Utama / Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Capaian	Tingkat Kinerja	Target	Capaian	Tingkat Kinerja	Target	Capaian	Tingkat Kinerja	Target	Capaian	Tingkat Kinerja	Target	Capaian	Tingkat Kinerja
1	Persentase Ketersediaan TIK yang Terintegrasi dengan Pelayanan Publik	Persen	100	98	98	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Persentase Penyelenggaraan SPBE se Sulawesi Barat	Persen	100	40	40	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persen	n/a	n/a	n/a	100	97	97	100	97	97	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Indeks SPBE	Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2.35	2.89	134,84	2.55	3.70	142,86
5	Persentase Penyediaan Layanan Telekomunikasi Desa	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	78,09	100	128,06	95,48	100	104,73
6	Persentase Perangkat Daerah dengan Rapor SPBE pada Kategori Minimal Cukup	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	73,81	100	135,48	88,1	100	113,51
7	Persentase diseminasi dan keterbukaan informasi publik	Persen	100	98	98	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja Utama / Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Capaian	Tingkat Kinerja	Target	Capaian	Tingkat Kinerja	Target	Capaian	Tingkat Kinerja	Target	Capaian	Tingkat Kinerja	Target	Capaian	Tingkat Kinerja
8	Persentase cakupan pengelolaan informasi melalui pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persen	n/a	n/a	n/a	100	0	0	100	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Persentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85	90,49	106,46	85	85,31	100,36
10	Persentase Cakupan Pemenuhan Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat	Persen	100	97,56	97,56	100	95,12	95,12	100	100	100	100	95,24	95,24	100	92,68	92,68
11	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi	Persen	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00	100	28,99	28,99	100	31,47	31,47	100	48,37	48,37

Sumber: Hasil Olahan Diskominfo, 2025

2.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Layanan yang diberikan oleh DiskominfoSas menyoasar beragam kelompok sasaran yang terdiri dari unsur pemerintahan, masyarakat umum, serta pelaku usaha dan komunitas digital. Kelompok sasaran utama layanan DiskominfoSas mencakup:

- 1) Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi

Layanan meliputi pengelolaan sistem informasi pemerintahan, penguatan infrastruktur TIK, dukungan jaringan komunikasi data antar instansi, serta layanan statistik sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data.

- 2) Masyarakat Umum dan Pengguna Informasi Publik

Melalui kanal diseminasi informasi seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi layanan publik, DiskominfoSas menyediakan akses informasi yang terbuka, cepat, dan terpercaya untuk mendukung keterlibatan publik dalam proses pemerintahan.

- 3) Media Massa dan Jurnalis

Sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi, DiskominfoSas menyediakan layanan publikasi, konferensi pers, serta klarifikasi informasi sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem komunikasi yang sehat dan berimbang.

- 4) Pelaku Usaha dan Komunitas Digital

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian memberikan dukungan berupa pelatihan literasi digital, fasilitasi akses internet, dan kerja sama dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital di daerah.

- 5) Aparat Keamanan Informasi dan Pejabat Pengelola Persandian

Dalam mendukung keamanan informasi pemerintah daerah, kelompok sasaran ini dilayani dengan penguatan sistem pengamanan persandian, penggunaan sertifikat elektronik, dan peningkatan kapasitas SDM bidang keamanan siber.

Dengan pendekatan layanan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya menjadi pendorong

utama transformasi digital daerah serta penjaga integritas data dan informasi publik yang andal.

2.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintahan, swasta, maupun komunitas masyarakat. Kolaborasi ini merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola komunikasi dan informasi yang efektif, penguatan keamanan informasi, serta pengelolaan data statistik yang akurat dan terpadu. Beberapa mitra utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat meliputi:

1) Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian bekerja sama dengan seluruh OPD di lingkup Pemprov Sulbar serta instansi vertikal seperti BPS, BSSN, dan Kementerian Kominfo dalam penguatan sistem informasi pemerintahan, pengelolaan statistik sektoral, serta pengembangan aplikasi pelayanan publik.

2) Media Massa dan Lembaga Penyiaran

Kemitraan dengan media lokal, regional, dan nasional dibangun untuk mendukung penyebaran informasi pembangunan, klarifikasi isu publik, serta menjaga ruang informasi agar tetap sehat dan berimbang.

3) Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi

Dalam rangka meningkatkan literasi digital, riset teknologi informasi, serta penguatan kapasitas SDM, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dalam hal pengembangan dan penerapan Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE. Terutama, merujuk pada peraturan yang diberlakukan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan pemenuhan indeks SPBE secara keseluruhan, sekolah menengah, dan lembaga pelatihan di Sulawesi Barat maupun di luar daerah.

4) Pelaku Industri Teknologi dan Telekomunikasi

Kolaborasi dilakukan dengan penyedia jasa internet (ISP), operator seluler, dan perusahaan teknologi untuk penguatan infrastruktur jaringan,

pengembangan layanan digital, serta perluasan akses komunikasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

5) Lembaga Keamanan dan Aparat Penegak Hukum

Untuk menjaga integritas dan keamanan informasi, khususnya dalam hal persandian dan perlindungan data pemerintah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian bersinergi dengan TNI, Polri, serta lembaga pengawas keamanan informasi nasional.

Kemitraan yang solid dan berkesinambungan ini menjadi fondasi penting bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulawesi Barat dalam mendorong transformasi digital daerah, memperkuat kedaulatan data, serta memastikan pelayanan publik berbasis teknologi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

2.7 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.7.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulawesi Barat merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.12 Pemetaan Permasalahan

No	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya transformasi digital	cakupan 4G di Provinsi Sulawesi Barat hanya sebesar 39,84%
		Kondisi infrastruktur informatika yang masih minim
		Kurangnya riset dan pengembangan (R&D) bidang Informatika untuk pengembangan <i>start up</i> dalam mendorong pertumbuhan bisnis dan ekonomi

No	Masalah	Akar Masalah
2	Belum optimalnya penerapan SPBE yang terpadu dan menyeluruh	Lemahnya aspek manajemen risiko dalam pengelolaan SPBE
		Kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan SPBE
3	Minimnya Keterbukaan Informasi Publik	Rendahnya kapasitas dan kesiapan pemerintah dalam menyediakan akses informasi publik
		Rendahnya transparansi ekonomi khususnya dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran
		Rendahnya komitmen daerah untuk mendukung keterbukaan informasi dalam hal tata Kelola dan dukungan anggaran
		Rendahnya penegakan hukum terkait keterbukaan informasi publik
		Belum tersedianya peraturan terkait keterbukaan informasi publik sampai di unit terkecil yakni tingkat desa
4	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Tidak dilaksanakannya perencanaan dalam rangka pengelolaan informasi dan komunikasi publik secara sistematis
		Kurangnya pelibatan instansi eksternal dan penyerapan aspirasi publik dalam pengelolaan informasi dan komunikasi
		Belum optimalnya penggunaan hasil riset organisasi atau instansi lain dalam proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik
		Kurangnya perhatian pada kebutuhan informasi khususnya segmentasi kelompok masyarakat penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan lainnya

No	Masalah	Akar Masalah
		Rendahnya pemahaman publik tentang hak untuk tahu (<i>Right To Know</i>)
		Rendahnya partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah
5	Rendahnya kualitas Pembangunan statistik	Tidak semua data sektoral memiliki standar data dan metadana statistik
		Belum optimalnya akses media penyebarluasan data
		Rendahnya pemahaman terkait proses pengumpulan/akuisisi, analisis dan diseminasi data
		Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang statistik dan manajemen data
		Belum optimalnya penyelenggaraan forum data Indonesia tingkat provinsi dan kolaborasi dengan Pembina data statistik
6	Masih rendahnya kematangan keamanan siber	Belum optimalnya tata Kelola keamanan siber
		Kurangnya infrastruktur keamanan siber
		Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang persandian

Sumber: Hasil Olahan Diskominfo, 2025

2.7.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Untuk dapat melihat isu-isu strategis dapat mengacu pada kondisi lingkungan dan eksternal. Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulawesi Barat, telaah Renstra Kementerian/Lembaga serta telaah KLHS dan RTRW, dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Perkembangan dan Pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* dan *Internet of Things (IoT)* dalam Kehidupan

Dalam era transformasi digital yang terus berkembang pesat, pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* dan *Internet of Things (IoT)* menjadi isu strategis yang sangat relevan dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi ini membawa peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi dengan kebijakan yang cermat dan berkelanjutan. AI telah merambah berbagai sektor, mulai dari layanan publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga keamanan. Dengan kemampuannya dalam menganalisis data besar (*big data*), AI mampu membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, memprediksi kebutuhan, hingga mengotomatiskan berbagai proses kerja. Di sisi lain, IoT memungkinkan perangkat fisik terhubung ke internet dan saling berkomunikasi, menciptakan sistem yang saling terintegrasi, seperti *smart city*, *smart farming*, dan *smart healthcare*. Namun dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* dan *Internet of Things (IoT)* perlu memperhatikan keamanan dan privasi data, ketimpangan akses, literasi digital, ketergantungan pada teknologi asing, kesiapan SDM serta etika dan regulasi dalam pemanfaatannya.

2. Kesenjangan Akses dan Infrastruktur TIK di Daerah 3T

Kesenjangan akses dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih menjadi tantangan serius di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di wilayah yang tergolong sebagai daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Meski kemajuan teknologi semakin pesat dan digitalisasi telah merambah berbagai sektor, belum semua masyarakat Sulawesi Barat memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati manfaatnya. Di beberapa kabupaten seperti Mamasa, Majene bagian pegunungan, dan sebagian wilayah Polman dan Pasangkayu, akses internet masih terbatas, jaringan komunikasi tidak stabil, dan infrastruktur pendukung seperti menara BTS maupun akses listrik belum sepenuhnya tersedia. Hal ini menyebabkan keterisolasian digital yang berimplikasi langsung terhadap pelayanan publik, pendidikan, ekonomi digital, dan akses informasi masyarakat. Perlu percepatan pembangunan

infrastruktur TIK untuk memastikan layanan digital dan informasi bisa diakses secara merata.

3. Tantangan Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pemerintah Daerah

Di era digital saat ini, keamanan siber dan perlindungan data menjadi isu krusial yang tidak bisa diabaikan, termasuk oleh pemerintah daerah. Bagi Provinsi Sulawesi Barat, yang tengah mendorong transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan, tantangan keamanan siber semakin kompleks dan mendesak untuk ditangani secara serius dan terstruktur.

Pemerintah daerah kini semakin banyak mengandalkan teknologi dalam pelayanan publik, pengelolaan administrasi, komunikasi antarinstitusi, dan penyimpanan data strategis. Namun, masih lemahnya sistem perlindungan data dan infrastruktur keamanan informasi di sebagian besar perangkat daerah menjadikan institusi pemerintah rentan terhadap berbagai ancaman siber, seperti peretasan (*hacking*) terhadap sistem informasi pemerintahan, kebocoran data pribadi dan data strategis daerah, *malware* dan *ransomware* yang dapat melumpuhkan layanan publik digital, pemalsuan identitas dan penyalahgunaan akses sistem, serangan *phishing* terhadap ASN melalui email atau aplikasi daring. Ancaman serangan siber terhadap sistem informasi pemerintahan terus meningkat. Penguatan kapasitas keamanan informasi dan persandian, termasuk membangun sistem keamanan yang terpadu dan Tangguh, meningkatkan kesadaran keamanan digital di kalangan ASN serta penerapan sertifikat elektronik dan pengamanan data sensitif, akan menjadi fokus penting.

4. Kualitas dan Integrasi Data Statistik Sektoral

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berbasis data, ketersediaan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi fondasi utama. Di Provinsi Sulawesi Barat, tantangan terhadap kualitas dan integrasi data statistik sektoral masih menjadi isu strategis yang perlu segera dibenahi secara sistematis dan menyeluruh. Saat ini, berbagai perangkat daerah telah menghasilkan data sektoral sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Namun, masih terdapat perbedaan format, metode pengumpulan, dan waktu rilis data yang belum seragam, sehingga menyulitkan proses konsolidasi data untuk kebutuhan perencanaan, evaluasi pembangunan, maupun

pengambilan kebijakan publik. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi yang saling terhubung antar perangkat daerah menyebabkan duplikasi, inkonsistensi, dan potensi kesalahan dalam interpretasi data. Diperlukan strategi penguatan satu data daerah yang akurat, terstruktur, dan berkelanjutan.

5. Kapasitas dan Kompetensi SDM di Bidang TIK, Statistik dan Persandian
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan. Di Provinsi Sulawesi Barat, penguatan SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Statistik, dan Persandian menjadi kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan zaman serta mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data dan teknologi. Hingga saat ini, ketersediaan tenaga profesional yang menguasai teknologi digital, keamanan informasi, dan pengelolaan data statistik masih sangat terbatas, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Banyak perangkat daerah belum memiliki SDM khusus yang menangani sistem informasi, keamanan siber, atau manajemen data sektoral secara optimal. Akibatnya, pemanfaatan TIK dan data statistik seringkali bersifat administratif, belum strategis, dan belum maksimal dalam mendukung perencanaan pembangunan maupun pengambilan kebijakan publik. Hal ini harus ditangani melalui pelatihan berkelanjutan dan rekrutmen tenaga profesional.
6. Transformasi Digital Layanan Publik yang Inklusif dan Berkelanjutan
Transformasi digital merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dan menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Transformasi digital layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis dan beragam. Transformasi digital bukan hanya soal mengalihkan layanan manual ke sistem elektronik, tetapi tentang merancang ulang proses pelayanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Pemerintah, melalui instansi seperti Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian,

berperan penting dalam membangun ekosistem digital yang menyatukan teknologi, kebijakan, dan sumber daya manusia.

Aspek inklusivitas berarti bahwa layanan digital harus dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali, termasuk masyarakat di daerah terpencil, kelompok disabilitas, lansia, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menuntut penyediaan infrastruktur TIK yang merata, aplikasi yang ramah pengguna, serta edukasi literasi digital secara berkelanjutan. Sementara itu, keberlanjutan transformasi digital terletak pada kemampuan pemerintah dalam menjaga konsistensi, keamanan, dan interoperabilitas sistem layanan, serta mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Perlu ada komitmen jangka panjang terhadap pembaruan sistem, pemeliharaan data yang akurat, serta penerapan prinsip keterbukaan dan keamanan informasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan mudah dijangkau. Kondisi ini diperberat oleh masih terbatasnya kualitas layanan digital di berbagai sektor, belum meratanya akses internet terutama pada wilayah blankspot, serta rendahnya integrasi dan keterpaduan data antarperangkat daerah. Selain itu, tata kelola informasi publik masih menghadapi tantangan berupa ketidakteraturan arus informasi, rendahnya kualitas komunikasi publik, serta belum optimalnya pemanfaatan kanal digital untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Dalam aspek statistik, data sektoral sering kali tidak mutakhir, tidak seragam, dan belum dikelola sesuai prinsip Satu Data Indonesia, sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis bukti. Di sisi lain, ancaman keamanan informasi semakin meningkat, sementara sistem pengamanan data pemerintahan dan mekanisme persandian masih memerlukan penguatan baik dari aspek teknis maupun kelembagaan.

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, pemerintah daerah menetapkan tujuan **“Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital”** sebagai arah pembangunan strategis yang menyeluruh dan berjangka panjang. Tujuan ini menjadi kerangka besar yang memandu upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi sebagai penggerak utama perubahan. Transformasi digital dipilih bukan semata sebagai solusi teknis, tetapi sebagai pendekatan untuk menyelesaikan akar masalah terkait pelayanan publik, transparansi informasi, kualitas data sektoralis, keamanan informasi pemerintahan, dan kesenjangan akses digital.

Dalam kerangka tujuan tersebut, pemerintah merumuskan beberapa sasaran strategis yang secara langsung menjawab permasalahan yang ada. Sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital”** diarahkan untuk memperbaiki kinerja layanan agar lebih cepat, lebih terintegrasi, dan lebih ramah pengguna, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang konsisten dan

mudah dijangkau. Sasaran **“Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik”** menjadi jawaban atas kebutuhan akan transparansi yang lebih kuat, dengan menghadirkan mekanisme komunikasi publik yang jelas, terpercaya, dan disampaikan melalui kanal digital yang dapat diakses setiap saat. Selanjutnya, sasaran **“Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Statistik Sektor”** ditetapkan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan mengikuti standar Satu Data Indonesia, sehingga kebijakan yang diambil lebih presisi dan relevan dengan kebutuhan daerah.

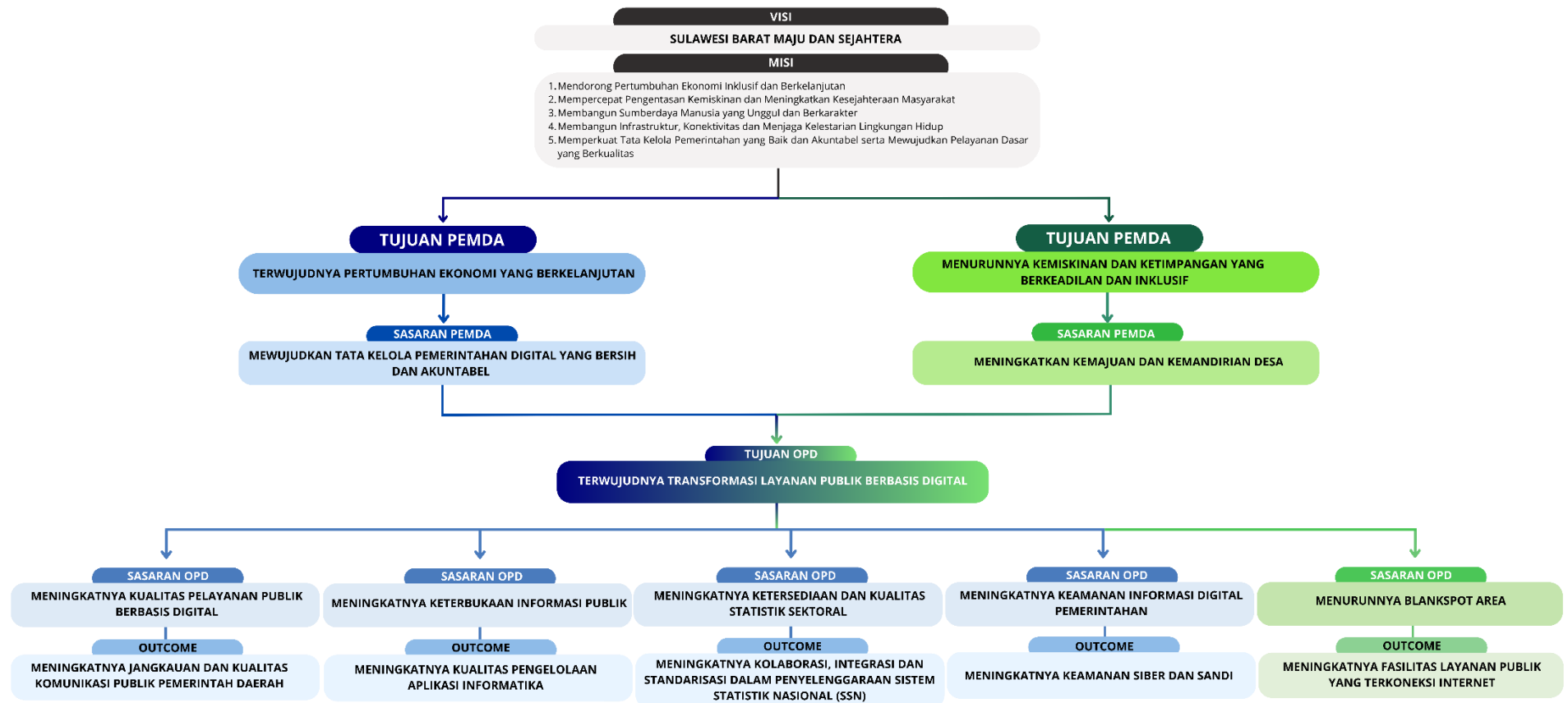
Sasaran berikutnya adalah **“Meningkatnya Keamanan Informasi Digital Pemerintahan”**, yang hadir sebagai respon terhadap meningkatnya risiko siber dan kebutuhan untuk menjaga integritas serta kerahasiaan informasi pemerintah. Dengan penguatan keamanan digital dan sistem persandian, pemerintah dapat melindungi data strategis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis elektronik. Terakhir, sasaran **“Menurunnya Blankspot Area”** menjadi elemen penting untuk menjamin pemerataan akses digital, khususnya bagi wilayah yang selama ini belum memiliki jaringan internet memadai. Pemenuhan sasaran ini memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, dapat menikmati manfaat dari transformasi digital secara setara.

Dengan rumusan tujuan dan sasaran tersebut, pemerintah daerah membangun arah transformasi yang komprehensif dan futuristik. Seluruh komponen diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar, sekaligus menyiapkan fondasi layanan publik digital yang lebih adaptif, aman, dan inklusif, sehingga pembangunan daerah dapat bergerak lebih maju dan selaras dengan kebutuhan masyarakat di era digital.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Prov. Sulawesi Barat 2025-2029

SASARAN RPJMD	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
SS-1.3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah	Angka	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	4,00	4,10	4,15	4,20	4,35	4,50
SS-2.3 Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	72,00
	Menurunnya Blankspot Area	Persentase Penurunan Blankspot Area	Persen	16,17	15,65	14,78	13,91	13,04	12,17
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Statistik Sektor	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,19	2,19	2,69	3,19	3,19	3,69
	Meningkatnya Keamanan Informasi Digital Pemerintahan	Indeks Keamanan Informasi	Angka	458	480	490	500	515	530

Gambar 3.1 Pohon Kinerja



3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian disusun untuk menjawab permasalahan utama sektor komunikasi, informatika, statistik, dan keamanan siber yang terjadi saat ini, sekaligus mengantisipasi isu strategis lima tahun mendatang. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, arah kebijakan merupakan rumusan kerangka tindakan yang menggambarkan langkah-langkah operasional yang ditempuh secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi. Dengan demikian, setiap strategi berikut diturunkan ke dalam arah kebijakan yang lebih konkret agar penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan terarah, terukur, dan konsisten. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah diuraikan pada tabel 3.1 maka strategi dan arah kebijakan kemudian di susun dengan penahapan sebagai berikut yang digambarkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat

Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Memanfaatkan kematangan SPBE; Peningkatan kualitas layanan berbasis data dan transparansi; Penguatan SDM pengelola layanan digital; 1. Penetapan dan implementasi awal arsitektur SPBE terpadu 2. Penataan layanan prioritas berbasis proses bisnis seragam 3. Standardisasi layanan digital OPD 4. Penguatan pengelolaan data layanan sebagai dasar evaluasi 5. Pelatihan SPBE dan manajemen layanan digital ASN	Integrasi layanan publik lintas OPD; Optimalisasi kolaborasi swasta; Penguatan manajemen layanan digital. 1. Pengembangan aplikasi layanan terintegrasi lintas sektor. 2. Penataan manajemen layanan digital (<i>service desk</i>). 3. Peningkatan kualitas UI/UX aplikasi. 4. Monitoring dan evaluasi kualitas layanan digital. 5. Penyusunan standar interoperabilitas layanan publik.	Integrasi penuh antar layanan. Penguatan kualitas layanan digital berbasis pengguna. Optimalisasi proses bisnis digital. 1. Integrasi layanan publik melalui platform tunggal. 2. Pemanfaatan dashboard kinerja layanan digital. 3. Optimalisasi alur pelayanan berbasis digital. 4. Peningkatan fitur layanan otomatis. 5. Pembakuan proses bisnis layanan digital lintas sektor.	Pemantapan layanan digital terintegrasi cerdas. Optimalisasi kualitas dan keandalan layanan. Integrasi data untuk pelayanan proaktif. 1. Pengembangan layanan publik berbasis AI. 2. Monitoring real-time kualitas layanan publik. 3. Konsolidasi ekosistem layanan terintegrasi. 4. Penyempurnaan interoperabilitas data. 5. Peningkatan nilai SPBE dan indeks transformasi digital.	Pemantapan interoperabilitas penuh. Pemanfaatan teknologi emerging. Penguatan kualitas layanan berbasis evaluasi berkelanjutan. 1. Finalisasi arsitektur SPBE terintegrasi. 2. Layanan publik berbasis AI untuk proses otomatis. 3. Monitoring kualitas layanan real-time. 4. Standardisasi UI/UX semua layanan digital. 5. Peningkatan nilai Indeks SPBE & Indeks Transformasi Digital.
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Pemantapan keterbukaan informasi dengan modal predikat “Informatif”; Penguatan komunikasi publik adaptif; Peningkatan kapasitas pengelola informasi; 1. Penguatan peran PPID utama dan pembantu 2. Penataan informasi wajib diumumkan 3. Optimalisasi website dan media sosial pemerintah 4. Integrasi awal SP4N–LAPOR	Perluasan layanan informasi publik berbasis digital. Peningkatan literasi keterbukaan informasi. Penguatan kapasitas komunikasi publik. 1. Pengembangan portal keterbukaan informasi publik. 2. Peningkatan layanan permintaan informasi secara online. 3. Penguatan konten komunikasi publik.	Penguatan keterbukaan informasi berbasis teknologi. Integrasi kanal informasi publik. Peningkatan responsivitas komunikasi publik. 1. Integrasi sistem informasi publik lintas PD. 2. Pemanfaatan analisis sentimen publik.	Penguatan ekosistem informasi publik cerdas. Penyempurnaan tata kelola PPID. Optimalisasi komunikasi publik digital. 1. Sistem rekomendasi informasi berbasis AI. 2. Analitik komunikasi publik tingkat lanjut. 3. Pemantapan standarisasi PPID. 4. Integrasi media komunikasi lintas kanal.	Pemantapan sistem informasi publik responsif. Optimalisasi komunikasi publik berbasis AI. Penguatan kelembagaan keterbukaan informasi. 1. Portal informasi publik dengan automasi permohonan. 2. AI untuk klasifikasi dan rekomendasi informasi. 3. Penyediaan data terbuka berkelanjutan.

Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	5. Literasi komunikasi publik dan keterbukaan informasi	4. Pelatihan jurnanisme publik dan manajemen media sosial. 5. Penyediaan panel data informasi publik.	3. Penguatan standar layanan informasi publik. 4. Pengembangan konten edukatif berkelanjutan. 5. Kolaborasi media untuk distribusi informasi.	5. Peningkatan nilai keterbukaan informasi publik.	4. Komunikasi publik berbasis analisis sentimen. 5. Penguatan nilai Indeks Komunikasi Pembangunan.
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Statistik Sektoral	Penataan tata kelola Satu Data Sulbar; Penyusunan baseline kualitas data sektoral; Peningkatan kompetensi statistik ASN. 1. Penguatan kelembagaan SDI 2. Standarisasi metadata dan klasifikasi data 3. Penyusunan awal metadata sektor prioritas. 4. Pelatihan statistik dasar sektoral.	Perluasan penerapan SDI. Penguatan koordinasi produsen data. Penguatan validitas dan konsistensi data sektoral. 1. Pemanfaatan portal SDI tingkat lanjut. 2. Penyusunan metadata seluruh OPD prioritas. 3. Penguatan mekanisme validasi berjenjang. 4. Penyeragaman format data lintas perangkat daerah. 5. Pelatihan statistik menengah.	Integrasi data sektoral – penuh. Penguatan sistem kualitas data. Optimalisasi analisis berbasis data. 1. Integrasi data sektoral ke portal SDI tingkat lanjut. 2. Implementasi sistem quality control otomatis. 3. Penyediaan manajemen data geospasial. 4. Pemanfaatan dashboard analisis pembangunan. 5. Penyusunan kajian statistik sektoral tahunan.	Optimalisasi data prediktif. Pemantapan kualitas statistik sektoral. Integrasi data pembangunan tingkat tinggi. 1. Pemanfaatan machine learning untuk prediksi pembangunan. 2. Penguatan quality control data otomatis. 3. Konsolidasi data sektoral sebagai dasar kebijakan. 4. Integrasi penuh geospasial data. 5. Peningkatan nilai IPS.	Pemantapan ekosistem Satu Data. Integrasi interoperability data. Penguatan analitik prediktif. 1. Finalisasi interoperability data lintas sektor. 2. <i>Predictive analytics</i> untuk kebijakan daerah. 3. Penguatan pengelolaan data sesuai domain IPS. 4. Konsolidasi kualitas data sektoral. 5. Optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Statistik.
Meningkatnya Keamanan Informasi Digital Pemerintahan	Penataan tata kelola keamanan informasi berbasis risiko; Penguatan kesadaran keamanan siber; Penguatan proteksi dasar SPBE; 1. Penyusunan kebijakan keamanan informasi dan pedoman teknis.	Penguatan sistem keamanan per aplikasi. Penerapan manajemen risiko keamanan. Pengembangan sistem respons insiden awal. 1. Penerapan <i>two-factor authentication</i> pada sistem prioritas.	Penguatan pertahanan siber daerah. Pengembangan sistem deteksi dini. Standardisasi keamanan sistem informasi. 1. Pengembangan SOC tingkat dasar. 2. Implementasi sistem deteksi intrusi.	Pemantapan SOC daerah. Penguatan AI-based security. Pengendalian keamanan informasi terstandar penuh. 1. Implementasi SOC lanjutan.	Pemantapan sistem keamanan terpadu. Penguatan <i>cyber defense</i> . Integrasi tata kelola keamanan informasi. 1. SOC penuh tingkat provinsi. 2. AI untuk threat intelligence. 3. Audit wajib tahunan.

Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	2. Penguatan kesadaran keamanan informasi (<i>security awareness</i>). 3. Penilaian awal risiko keamanan informasi (<i>IT risk assessment</i>). 4. Pengembangan pusat data aman awal. 5. Integrasi awal keamanan informasi dalam aplikasi pemerintah.	2. Implementasi pengendalian akses dan enkripsi data. 3. Pengembangan sistem pencatatan dan respons insiden sederhana. 4. Audit keamanan pada aplikasi prioritas. 5. Penguatan standar keamanan perangkat daerah.	3. Standardisasi pengamanan aplikasi pemerintah. 4. Audit keamanan menyeluruh. 5. Penguatan SDM keamanan informasi tingkat lanjut.	2. Deteksi anomali berbasis AI. 3. Standardisasi keamanan seluruh aplikasi. 4. Audit keamanan tahunan. 5. Peningkatan Indeks Keamanan Informasi & Indeks Siber.	4. Standardisasi keamanan penuh. 5. Peningkatan Indeks Keamanan Informasi & Siber.
Menurunnya Blankspot Area	Pemetaan dan verifikasi kondisi blankspot. Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur TIK daerah. Penguatan kolaborasi sektor telekomunikasi. 1. Pemetaan wilayah blankspot dan kualitas jaringan. 2. Penyusunan rencana intervensi infrastruktur internet daerah. 3. Sinergi dengan operator dan BAKTI Komdigi. 4. Penyusunan prioritas desa/kelurahan blankspot. 5. Penyediaan titik akses internet publik prioritas.	Perluasan pembangunan infrastruktur internet. Optimalisasi jaringan eksisting. Penguatan monitoring kualitas jaringan. 1. Pembangunan BTS dan fiber optik pada desa prioritas. 2. Peningkatan kapasitas titik akses internet publik. 3. Pemetaan kualitas jaringan secara berkala. 4. Kolaborasi operator untuk perluasan jaringan. 5. Penguatan pengawasan mutu layanan telekomunikasi.	Penyempurnaan intervensi infrastruktur TIK. Integrasi jaringan internet dengan layanan publik. Pemantauan kualitas jaringan berbasis teknologi. 1. Perluasan jaringan ke titik tersisa. 2. Penyediaan jaringan untuk layanan publik prioritas. 3. Integrasi monitoring kualitas jaringan dengan dashboard SPBE. 4. Optimalisasi perawatan jaringan. 5. Evaluasi capaian penurunan blankspot.	Pemantapan konektivitas wilayah prioritas. Optimalisasi jaringan untuk seluruh OPD dan layanan publik. Penguatan keberlanjutan infrastruktur TIK. 1. Konsolidasi capaian zero blankspot. 2. Penyediaan jaringan kelas layanan untuk OPD. 3. Penguatan skema pembiayaan TIK. 4. Monitoring kualitas sinyal berbasis IoT. 5. Peningkatan persentase fasilitas publik terkoneksi internet.	Zero blankspot berkelanjutan; Optimalisasi jaringan internet publik. Infrastruktur digital inklusif. 1. Pemeliharaan & kualitas jaringan. 2. Monitoring kualitas sinyal berbasis IoT. 3. 100% fasilitas publik terkoneksi.

3.4 Perumusan Program Prioritas

Tabel 3.3 Perumusan Program Prioritas

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan Prioritas
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
		2.16.03.1.02.0030 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
		2.16.03.1.02.0031 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
		2.16.03.1.02.0032 Penyediaan Akses Internet
		2.16.03.1.02.0037 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.0019 Peningkatan kualitas statistik sektoral
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2.21.02.1.01.0006 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sebagaimana RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							11.851.453.268		10.169.793.727		10.070.469.029		11.436.017.258		11.963.688.946
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	75,00	75,50	77,00	11.851.453.268	79,00	10.169.793.727	81,00	10.070.469.029	83,00	11.436.017.258	85,00	11.963.688.946
		Indeks Kematangan Inovasi OPD	Angka	62,00	62,00	67,00		72,00		77,00		82,00		87,00	
		Persentase BMD OPD dalam Kondisi	Persen	60,00	65,00	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00	
		Indeks SPBE OPD	Indeks	4,28	4,28	4,30		4,35		4,40		4,45		4,50	
		Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran OPD	Persen	93,69	84,00	100		100		100		100		100	
		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	81,26	83,00	85,00		87,00		89,00		91,00		93,00	
2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						180.000.000		210.000.000		240.000.000		270.000.000		300.000.000
2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	2		30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000
2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.16.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000
2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000
2.16.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	n/a	n/a		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
2.16.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000
2.16.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.16.01.1.01.0012 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
2.16.01.1.01.0013 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu		Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Subtansi				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.081.453.268		6.581.793.727		7.164.469.029		7.762.017.258		8.421.688.946
2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	73	73		8.816.453.268		6.301.793.727		6.869.469.029		7.452.017.258		8.096.688.946
2.16.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	n/a	n/a		200.000.000		210.000.000		220.000.000		230.000.000		240.000.000
2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.16.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	4		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000
2.16.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
2.16.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
2.16.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.16.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
2.16.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						180.000.000		392.000.000		204.000.000		416.000.000		228.000.000
2.16.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	-	200.000.000				-	200.000.000			-
2.16.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen			5.000.000	5.000.000			5.000.000		5.000.000			5.000.000
2.16.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	20.000.000	22.000.000			24.000.000		26.000.000			28.000.000
2.16.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen			5.000.000	5.000.000			5.000.000		5.000.000			5.000.000
2.16.01.1.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang			10.000.000	10.000.000			10.000.000		10.000.000			10.000.000
2.16.01.1.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan			10.000.000	10.000.000			10.000.000		10.000.000			10.000.000
2.16.01.1.05.0008 Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang			10.000.000	10.000.000			10.000.000		10.000.000			10.000.000
2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	2	100.000.000	110.000.000			120.000.000		130.000.000			140.000.000
2.16.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang			5.000.000	5.000.000			5.000.000		5.000.000			5.000.000
2.16.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang			5.000.000	5.000.000			5.000.000		5.000.000			5.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah						550.000.000		566.000.000		582.000.000		598.000.000		614.000.000
2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		10.000.000		13.000.000		16.000.000		19.000.000		22.000.000
2.16.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1		10.000.000		13.000.000		16.000.000		19.000.000		22.000.000
2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000
2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
2.16.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
2.16.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
2.16.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						540.000.000		1.090.000.000		540.000.000		1.040.000.000		1.040.000.000
2.16.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit				-		-		-		500.000.000		-
2.16.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-		-		500.000.000		-		-		500.000.000
2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket				-		50.000.000		-		-		-
2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	n/a	n/a		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
2.16.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	n/a	n/a		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
2.16.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	n/a	n/a		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
2.16.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
2.16.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	n/a	n/a		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						895.000.000		905.000.000		915.000.000		925.000.000		935.000.000
2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		180.000.000		190.000.000		200.000.000		210.000.000		220.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.16.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000
2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000
2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000
2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	n/a	n/a		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
2.16.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	n/a	n/a		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
2.16.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	n/a	n/a		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	Unit	1	1		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.16.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili- tasi	Unit	1	1		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
2.16.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili- tasi	Unit	30	33		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Angka	60,94*	62,00	64,00		66,00		68,00		69,00		70,00	
2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi														
2.16.02.1.01.0014 Relasi Media		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	12	12	12	5.000.000.000	12	5.000.000.000	12	5.000.000.000	12	5.000.000.000	12	5.000.000.000
2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten		Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	504	504	504	100.000.000	50	150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000
2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik		Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	-	-	3	50.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	2	2	2	1.900.000.000	2	1.500.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	20	34	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000
2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	10	13	13	70.000.000	11	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000
2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	4	3	1	3.500.000	5	100.000.000	8	150.000.000	10	200.000.000	15	250.000.000
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Nilai Dimensi Tata Kelola SPBE	Angka	3,40	3,90	4,30		4,50		4,50		4,50		4,50	
		Nilai Dimensi Manajemen SPBE	Angka	2,18	3,00	3,00		3,00		3,27		3,36		3,55	
	Meningkatnya Fasilitas Layanan Publik yang Terkoneksi Internet	Persentase Fasilitas Layanan Publik yang Terkoneksi Internet	Persen	61,33	70,39	80,46		90,53		100		100		100	
2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terkelolanya Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi														
2.16.03.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	Dokumen	160		5	200.000.000	7	200.000.000	9	200.000.000	11	200.000.000	13	200.000.000
2.16.03.1.02 Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terkelolanya E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi														
2.16.03.1.02.0013 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi		Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen	n/a		100	200.000.000	120	200.000.000	140	200.000.000	160	200.000.000	180	500.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.16.03.1.02.0019 Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	kabupaten/k ota			6	620.000.000	9	300.000.000	12	300.000.000	15	300.000.000	18	400.000.000
2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional		Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi			20	200.000.000	30	500.000.000	40	500.000.000	50	500.000.000	60	500.000.000
2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi		Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan			42	550.000.000	52	1.000.000.000	62	1.000.000.000	72	1.000.000.000	82	1.000.000.000
2.16.03.1.02.0023 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen			4	350.000.000	5	300.000.000	6	300.000.000	7	300.000.000	8	300.000.000
2.16.03.1.02.0024 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen			5	300.000.000	6	300.000.000	7	300.000.000	8	300.000.000	9	500.000.000
2.16.03.1.02.0030 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	perangkat daerah			41	1.310.000.000	41	1.000.000.000	41	800.000.000	41	800.000.000	41	800.000.000
2.16.03.1.02.0031 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Dokumen			6	2.200.000.000	6	400.000.000	8	400.000.000	10	400.000.000	12	400.000.000
2.16.03.1.02.0032 Penyediaan Akses Internet		Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah			141	6.000.000.000	241	6.000.000.000	341	6.000.000.000	441	6.000.000.000	541	2.000.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.16.03.1.02.0033 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	2	3	18	2.000.000.000	22	1.750.000.000	26	1.750.000.000	30	1.500.000.000	34	1.500.000.000
2.16.03.1.02.0034 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	5	350.000.000	6	350.000.000	7	350.000.000	8	350.000.000	9	350.000.000
2.16.03.1.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan	n/a	n/a	4	88.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000
2.16.03.1.02.0036 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	2	3	38	315.000.000	45	300.000.000	52	300.000.000	60	300.000.000	68	300.000.000
2.16.03.1.02.0037 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah		Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Laporan	n/a	n/a	1	10.500.000.000	1	1.000.000.000	1	800.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							50.000.000		1.146.684.000		1.146.684.000		1.146.684.000		1.146.684.000
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia IPS	Angka	1,75	1,75	1,75	50.000.000	2,25	1.146.684.000	2,75	1.146.684.000	2,75	1.146.684.000	3,25	1.146.684.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi						50.000.000		1.146.684.000		1.146.684.000		1.146.684.000		1.146.684.000
2.20.02.1.01.0016 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia		Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	n/a	n/a	25,00	8.958.000	100	146.684.000	100	146.684.000	100	146.684.000	100	146.684.000
2.20.02.1.01.0017 Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional		Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekayasa dari pembina data statistik	%	n/a	n/a	0	-		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
2.20.02.1.01.0018 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	%	n/a	n/a	50	32.084.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
2.20.02.1.01.0019 Peningkatan kualitas statistik sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	n/a	n/a	25	8.958.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
2.20.02.1.01.0020 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	0	0	0	-		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
2.20.02.1.01.0021 Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral		Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Laporan	n/a	n/a	0	-		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							65.000.000		260.000.000		325.000.000		390.000.000		162.000.000
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi	Indeks Keamanan Siber dan Sandi	Angka	2,76	2,54	2,56	65.000.000	2,60	260.000.000	2,70	325.000.000	2,80	390.000.000	2,90	162.000.000
2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi						65.000.000		225.000.000		290.000.000		355.000.000		127.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.21.02.1.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	0	0		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
2.21.02.1.01.0006 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	20	22	25	65.000.000	27	130.000.000	30	195.000.000	33	260.000.000	36	32.000.000
2.21.02.1.01.0007 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan		Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Laporan	0	0	0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
2.21.02.1.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	Dokumen	0	0	0	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Terpolanya Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi						-		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
2.21.02.1.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kegiatan	0	0	0	-	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000

Untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, telah disusun sejumlah subkegiatan prioritas yang mendukung langsung pencapaian program prioritas daerah. Subkegiatan ini dirancang secara selektif, fokus pada hasil, serta mempertimbangkan urgensi, manfaat, dan daya dukung terhadap transformasi layanan publik berbasis digital. Seluruh subkegiatan menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan program selama periode lima tahun mendatang dan akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)
1	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
			2.16.02.1.01.0014 - Relasi Media
			2.16.02.1.01.0018 - Diseminasi Informasi
			2.16.02.1.01.0022 - Pelayanan Informasi Publik
			2.16.02.1.01.0024 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
			2.16.03.1.02.0019 - Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
			2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
		Meningkatnya Fasilitas Layanan Publik yang Terkoneksi Internet	2.16.03.1.02.0030 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
			2.16.03.1.02.0032 - Penyediaan Akses Internet
			2.16.03.1.02.0036 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)
3	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
			2.20.02.1.01.0016 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
			2.20.02.1.01.0017 - Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional
			2.20.02.1.01.0018 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
			2.20.02.1.01.0019 - Peningkatan kualitas statistik sektoral
			2.20.02.1.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
			2.20.02.1.01.0021 - Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral
4	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi	2.21.02.1.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
			2.21.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
			2.21.02.1.01.0006 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)
			2.21.02.1.01.0007 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
			2.21.02.1.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
			2.21.02.1.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
			2.21.02.1.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
5	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Fasilitas Layanan Publik yang Terkoneksi Internet	

4.2 TARGET KINERJA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan target kinerja perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik yang adaptif terhadap kemajuan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta dinamika pembangunan daerah. Target yang disusun mencerminkan arah pembangunan yang terukur dan berorientasi pada hasil nyata, dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, capaian sebelumnya, serta sumber daya yang tersedia.

Seluruh indikator dan capaian tahunan dirancang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan efektivitas layanan, perluasan jangkauan informasi publik, penguatan pengelolaan data yang akurat, dan terjaminnya keamanan informasi pemerintahan. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat terus berjalan secara selaras, terarah, dan mendukung transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah	Angka	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	4,00	4,10	4,15	4,20	4,35	4,50
3	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	72,00
4	Persentase Penurunan Blankspot Area	Persen	16,17	15,65	14,78	13,91	13,04	12,17
5	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,19	2,19	2,69	3,19	3,19	3,69
6	Indeks Keamanan Informasi	Angka	458	480	490	500	515	530
7	Nilai SAKIP OPD	Poin	75,50	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00
8	Indeks Kematangan Inovasi OPD	Angka	62,00	67,00	72,00	77,00	82,00	87,00
9	Persentase BMD OPD dalam Kondisi Baik	Persen	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
10	Indeks SPBE OPD	Indeks	4,28	4,30	4,35	4,40	4,45	4,50
11	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran OPD	Persen	84,00	100	100	100	100	100
12	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	83,00	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00

4.3 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah berjalan secara efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penetapan target ini mengacu pada prioritas pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta kebutuhan riil di

lapangan, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antarsektor dan perkembangan teknologi yang terus bergerak dinamis.

Setiap target diarahkan untuk memperkuat peran bidang urusan yang dikelola, mulai dari pengembangan layanan informasi dan komunikasi publik yang transparan, peningkatan infrastruktur dan layanan digital, pengelolaan data dan statistik sektoral yang akurat dan terpadu, hingga pengamanan informasi pemerintahan yang andal. Dengan target yang terstruktur dan berorientasi pada capaian hasil, diharapkan pelaksanaan urusan ini mampu mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun sebagai alat ukur utama untuk menilai pencapaian kinerja perangkat daerah secara objektif. Setiap indikator dirancang agar mencerminkan hasil yang ingin dicapai, serta mampu memberikan gambaran atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan. Indikator-indikator ini akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di Tingkat Provinsi yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,19	2,19	2,69	3,19	3,19	3,69

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 dilaksanakan dalam kerangka transisi strategis yang bersifat sistemik dan berorientasi jangka panjang sebagai upaya mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045. Renstra ini bukan hanya merupakan instrumen operasional pembangunan dalam satu siklus lima tahunan, tetapi juga merupakan dokumen transisional yang menjembatani pencapaian dan pembelajaran dari periode sebelumnya Tahun 2020–2024 menuju konsolidasi dan proyeksi pembangunan secara berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya yakni Tahun 2030–2034.

Pedoman transisi ini mengatur mekanisme penyesuaian kebijakan dan program prioritas daerah secara adaptif, sehingga arah strategis yang ditetapkan pada Renstra Tahun 2025–2029 dapat menjadi fondasi yang kuat dan relevan untuk perumusan strategi dan arah kebijakan Tahun 2030–2034 yang lebih progresif dan berbasis tantangan masa depan. Renstra ini juga telah memuat arah kebijakan Tahun 2030 sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2030 yang disusun pada Tahun 2029 nantinya atau setelah periode Renstra Tahun 2025–2029 berakhir untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun Renja Tahun 2030 di masa transisi tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra periode berikutnya, yaitu Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2030–2034.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang mengedepankan pendekatan teknokratik, normatif, partisipatif, politis, dan top-down-bottom-up, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Strategis ini menjadi dokumen acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan, serta sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA). Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat merupakan penanggungjawab pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan elemen esensial dalam penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan berbasis kinerja. Dalam kerangka Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029, proses pengendalian dan evaluasi dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras dengan arah strategis, indikator kinerja, serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian pelaksanaan dilakukan setiap tahun berjalan, sedangkan evaluasi hasil Renstra dilakukan pada pertengahan dan akhir periode Renstra.

Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi, digunakan sejumlah Indikator sebagai berikut:

- Indikator Masukan (*Input*), digunakan untuk mengukur jumlah sumberdaya (dana/anggaran, SDM, peralatan/sarana-prasarana, material lainnya) yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.
- Indikator Proses, untuk menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan.
- Indikator Keluaran (*Output*), untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, sejauhmana terlaksana sesuai rencana.
- Indikator Hasil (*Outcome*), untuk menggambarkan kondisi atau hasil nyata dari berfungsinya suatu output/keluaran.

- Indikator Dampak (*Impact*), digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat tercapai.

Hasil dari pengendalian dan evaluasi diharapkan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan terhadap kelemahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan rencana. Selain itu, hasil dari pengendalian dan evaluasi juga menjadi refleksi dan memberi umpan balik (*feedback*) bagi penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat periode berikutnya yakni Tahun 2030–2034.

2025-2029

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

